



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI IX DPR RI
DENGAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA**

- Tahun Sidang : 2024-2025
Masa Persidangan : III
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari & Tanggal Rapat : Senin, 05 Mei 2025
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI
Acara : 1. Membahas kesiapan menyelenggarakan program Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro di 18 provinsi serta target capaian yang akan dihasilkan.
2. Membahas implementasi skema *School to Work Transition* bekerja sama dengan K/L untuk menekan angka pengangguran di Indonesia.
3. Membahas evaluasi permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sektor industri padat karya pemerintah atau swasta.
4. Membahas Program dan Anggaran Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) terkait Pengembangan BLK Kemaritiman dan *Labor Market Information and Skills System Transformation for Labor Market Flexibility Project* (LISTRAF) Tahun 2025.
- Waktu : Pukul 10.28 s.d. 12.25 WIB
Ketua Rapat : Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A. (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI/F-PKB)
Sekretaris Rapat : Ida Nuryati, S.Sos, M.A (Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI)
Hadir : **A. PIMPINAN DAN ANGGOTA:**
27 orang Anggota hadir dari 43 orang Anggota dengan rincian sebagai berikut:
- I. PIMPINAN:**
1. Charles Honoris (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI/ F-PDI PERJUANGAN)
 2. M. Yahya Zaini, S.H. (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI/ F-P. GOLKAR)

3. Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI/ F-PKB)

II. ANGGOTA:

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (F-PDI PERJUANGAN)

4 orang Anggota dari 7 Anggota

1. Indah Kurnia, S.E., M.M.
2. Obet Rumbruren
3. Eko Kurnia Ningsih
4. H. Ahmad Safei, S.H., M.H

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (F-P. GOLKAR)

4 orang Anggota dari 7 Anggota

1. Delia Pratiwi Sitepu, SH.
2. dr. Maharani
3. Teti Rohatiningsih, S.Sos.
4. H. Tubagus Haerul Jaman, S.E.

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (F-P. GERINDRA)

5 orang Anggota dari 5 Anggota

1. Ade Rezki Pratama, S.E., M.M
2. Ir. Sri Meliyana
3. Ir. H. Nuroji
4. Obon Tabroni
5. Hj. Mariana, SAB., MM.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-P. NASDEM)

2 orang Anggota dari 4 Anggota

1. Irma Suryani, S.E., M.M.
2. Rahmawati Herdian, S.H., M.Kn.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

2 orang Anggota dari 4 Anggota

1. Asep Romy Romaya
2. Dr. Arzeti Bilbina Setyawan, S.E., M.A.P

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)

2 orang Anggota dari 4 Anggota

1. drh. H. Achmad Ru'yat, M.Si
2. H. Alifudin, S.E., M.M

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
(F-PAN)**

3 orang Anggota dari 4 Anggota

1. Ir. H. Sahidin
2. Surya Utama, S.I.P
3. H.M. Muazzim Akbar, S.I.P

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
(F-P. DEMOKRAT)**

2 orang Anggota dari 3 Anggota

1. Dra. Lucy Kurniasari
2. Tutik Kusuma Wardhani, S.E., M.M.,
M.Kes.

B. PEMERINTAH/UNDANGAN

1. Menteri Ketenagakerjaan RI (Prof. Yassierli, S.T., M.T., Ph.D.)
2. Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI (Immanuel Ebenezer Gerungan, S.Sos.)
3. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI (Drs. Aris Wahyudi, M.Si.)
4. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Agung Nur Rohmad, S.T., M.M.)
5. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Darmawansyah, S.T., M.Si.)
6. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dra. Indah Anggoro Putri, M.Bus.)
7. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan (Anwar Sanusi, Ph.D.)
8. Staf Ahli Bidang Sosial, Politik & Kebijakan Publik (Ir. Ismail Pakaya, M.E.)
9. Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Ketenagakerjaan (Drs. Aris Wahyudi, M.Si.)
10. Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Internasional (Haryanto, S.H., M.H.)

JALANNYA RAPAT:

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.28 WIB)

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Ada tiga agenda rapat kita pada hari ini, namun ada permohonan satu tambahan agenda lagi dari Kementerian Ketenagakerjaan.

Yang pertama, agenda kita yakni membahas kesiapan penyelenggaraan program Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro di 18 provinsi serta target capaian yang akan dihasilkan. Dua, membahas implementasi skema *School to Work Transition* bekerja sama dengan kementerian dan lembaga untuk menekan angka pengangguran di Indonesia. Tiga, membahas evaluasi permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sektor industri padat karya pemerintah atau swasta. Dan yang keempat tambahan usulan agenda, yakni pembahasan program dan anggaran Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) terkait Pengembangan BLK Kemaritiman dan *Labor Market Information and Skills System Transformation for Labor Market Flexibility Project* tahun 2025.

Ibu/Bapak yang saya hormati.

Kita sepakati dulu rapat kita akan selesai pukul berapa? Pukul 12.00 dulu, ya? Karena Pak Menteri dan Pak Wamen akan ada rapat pukul 15.00, ya.

Oke.

Kita sepakati dulu pukul 12.00, nanti kalau kira-kira butuh, kita perpanjang kita perpanjang. Kita sepakati pukul 12.00.

(RAPAT: SETUJU)

Selanjutnya saya berikan waktu kepada Pak Menteri untuk memberikan pemaparannya, 20 menit cukup? Diusahakan cukup, ya.

Silakan, Pak Menteri.

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Prof. YASSIERLI, S.T., M.T., Ph.D):

Baik, terima kasih, Ibu Pimpinan Sidang.

Bapak dan Ibu yang saya hormati.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang sama-sama kita hormati Pimpinan Komisi IX DPR RI, Ibu Nini, Pak Yahya Zaini, Pak Charles,
Yang kami hormati Bapak dan Ibu Anggota Komisi IX, perwakilan dari fraksi-fraksi, Bapak dan Ibu semua yang hadir pada ruangan ini.**

Pertama sekali, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Komisi IX atas berkenannya untuk di-*reschedule* jadwalnya karena kami, mohon maaf, kemarin kami mendapatkan undangan untuk sidang kabinet sehingga waktunya kalau kita rapatnya jam 13.00, rasanya terlalu mepet. Sehingga kemudian *alhamdulillah*, Bapak dan Ibu dari Pimpinan Komisi IX berkenan untuk dimajukan jadwalnya.

Kami akan memaparkan terkait dengan agenda yang sudah ditetapkan. Kami akan mulai dengan yang pertama, terkait dengan rencana tenaga kerja, kemudian yang kedua implementasi *School to Work Transition*, kemudian terkait dengan PHK, dan yang terakhir usulan penambahan anggaran PHLN, itu pinjaman untuk luar negeri.

Mulai dari yang pertama. Jadi, Bapak dan Ibu, ini menarik sebenarnya terkait tentang program Rencana Tenaga Kerja Mikro yang memang ini menjadi program rutin di Kementerian Ketenagakerjaan. Dan, Bapak dan Ibu, ini terus terang kalau saya dengar baru sekarang, ya, kita diminta untuk mengelaborasi secara detail terkait dengan program ini, ya.

Lanjut, jadi RTK, Rencana Tenaga Kerja Mikro ini memang salah satu yang kita minta kepada perusahaan agar mereka bisa menyiapkan perencanaan tenaga kerjanya ke depan. Jadi, mikro ini adalah untuk skala perusahaan, landasan hukumnya ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, kemudian ada juga Permenakertrans Tahun 2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Mikro. Jadi, tujuannya adalah meminta perusahaan untuk memetakan kebutuhan perencanaan SDM-nya ke depan dan agar perencanaan itu terarah. Sehingga diharapkan ketika ada perencanaan maka terjaminlah perlindungan SDM-nya, hubungan industrial yang harmonis, kesejahteraan, dan seterusnya.

Dan pembagian peran, pemerintah pusat, itu menyusun yang disebut dengan Rencana Tenaga Kerja Nasional, RTKN. Kemudian provinsi menyusun RTKD dan perusahaan menyusun yang sifatnya mikro untuk level perusahaan

masing-masing. Dalam bahasa manajemen, itu yang disebut dengan *manpower planning*, jadi perencanaan ke depan kira-kira kebutuhan tenaga kerjanya seperti apa. Ini adalah gambaran, *next*.

Framework Bagaimana suatu RTK Mikro itu disusun, ada dinamika internal perusahaan, kemudian ada dinamika, ya, eksternal sampai global, kemudian mereka membuat sebuah proyeksi perencanaan tenaga kerjanya seperti apa ke depan. Dan ini nanti menjadi masukan untuk penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah dan Rencana Tenaga Kerja Nasional. Jadi, pendekatannya *bottom up* dari sifatnya itu mikro sampai kemudian nanti menjadi makro dan itu juga suatu proses iterasi sebenarnya.

Bapak dan Ibu.

Memang, *next*, *potrait* yang ada masih jauh, ya, inilah yang salah satu tantangan bagi kami karena kewajiban untuk mengisi data terkait tentang rencana tenaga kerja ke depan itu sejalan dengan sistem pelaporan WLKP, wajib lapor perusahaan, ya, yang kemudian kita minta kepada semua perusahaan yang ada. Saat ini memang rata-rata baru 5%, inilah menjadi tantangan bagi kami bagaimana kita terus melakukan kampanye kepada perusahaan bahwa mereka punya kewajiban untuk, ya, memberikan laporan data-data terkait tentang perusahaannya. Ini adalah gambaran, ya, yang paling tinggi memang Jakarta, kemudian yang paling rendah adalah di daerah semakin timur, tapi ini juga terkait dengan realitas perusahaannya itu sendiri, ya. Kalau perusahaannya itu kemudian, apa, perusahaan kecil menengah, tentu kemudian seperti ini belum menjadi sebuah *culture* bagi mereka untuk melaporkan kepada pemerintah. Lanjut.

Terkait dengan kegiatan ini sendiri, yang tahun lalu kita lakukan, kita memang punya kegiatan yang sifatnya *offline* dan menurut kami ini menarik sebenarnya, apalagi kalau dimungkinkan adanya kerja sama dengan mitra saat pelaksanaan *offline*, ya. Tahun lalu kita membuat dua *Training of Trainers*, jadi kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh Kemnaker dengan pesertanya itu adalah para disnaker provinsi untuk memberikan bimbingan terkait dengan bagaimana melakukan perencanaan untuk penyusunan RTK Mikro. Dan tahun lalu dilaksanakan dua kali di wilayah tengah dan timur, dan wilayah barat. Kemudian disnaker provinsi yang kemudian melakukan *Training of Trainers* juga kepada disnaker kota/kabupaten dan kemudian nanti mereka melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada perusahaan. *Next*.

Namun, tahun ini, Bapak dan Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi IX, kami karena keterbatasan anggaran, kita memang hanya bisa melakukannya secara *online*, ya. Jadi, tahun lalu kita bisa lakukan *offline*, tapi tahun ini *online*. Kita sudah

laksanakan di tanggal 5 Maret, kemudian 15-17 April, 22 April dan kita masih ada kegiatan.

Jadi, terkait dengan agenda yang pertama, RTK Mikro ini memang menjadi salah satu program yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan secara berjenjang, kita ingin memberikan pelatihan kepada perusahaan bagaimana cara membuat suatu perencanaan tenaga kerja ke depan. Dan *alhamdulillah*, selama ini berjalan dengan baik dan dokumen inilah yang kemudian kami gunakan untuk perancangan rencana tenaga kerja daerah, rencana tenaga kerja nasional. Baik, ini yang pertama, terkait dengan agenda yang pertama.

Saya mohon izin untuk masuk kepada agenda yang kedua, implementasi skema *School to Work Transition*. Ini yang diminta oleh Sekretariat DPR kepada kami, Komisi IX, untuk kami memaparkan terkait dengan program ini. Bapak dan Ibu, yang pertama yang ingin kami sampaikan memang kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain ini menjadi kunci bagi Kementerian Ketenagakerjaan karena kita melihat pembenahan atau perbaikan Ketenagakerjaan itu tidak hanya bisa dilihat dari sisi hilir saja, tapi harus kita proaktif kepada sisi hulu.

Jadi, beberapa hal terkait dengan penciptaan lapangan kerja, kepastian penciptaan lapangan kerja, terkait dengan integrasi, bagaimana, apa yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian lain. Kemudian pelatihan bersama itu hanya bisa kita lakukan kalau adanya kolaborasi dengan K/L yang lain.

Dan *alhamdulillah* saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada *support* dari Pimpinan Komisi IX dan Anggota Komisi IX, selama 6 bulan kami diamanahkan, kita proaktif untuk mendatangi kementerian-kementerian lain, membuat MoU, mencari peluang untuk kami melakukan kerja sama. Ini contoh dengan BUMN, terkait dengan produktivitas. Dikdasmen, terkait dengan integrasi kurikulum SMK dengan BLK. UMKM, kita ada pelatihan bersama. Kemudian KKP, kita mencoba mengeksplorasi penciptaan lapangan kerja di Kementerian Kelautan seperti apa, hal yang sama dengan Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian.

Kemudian P2MI, lebih kepada pemanfaatan fasilitas kami karena ini adalah program pemerintah bersama, Komdigi terkait dengan pelatihan *digital talent*, Badan Gizi Nasional terkait juga tentang penciptaan lapangan kerja baru, termasuk juga kami menjalin kerja sama dengan luar negeri untuk peluang pengiriman tenaga magang yang sifatnya itu adalah *skill worker*, dan ini semua adalah bagian dari upaya-upaya yang kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. *Next*.

Spesifik yang akan kita gulirkan dalam waktu dekat, kami melihat yang pertama, Bapak dan Ibu, program pelatihan yang kami lakukan selama ini dari Kemnaker itu variasinya sangat banyak. Dari 300 balai latihan kerja yang kita miliki, kemudian masing-masing memiliki tema sendiri-sendiri yang memang sebagian sudah disesuaikan dengan kebutuhan lokal, tapi kami melihat untuk tahun ini kita perlu memutuskan fokus pelatihannya ke mana. Sehingga kami menggabung itu semua dalam suatu skema yang kita sebut dengan program *School to Work Transition*. Apa itu? Program integrasi pelatihan dan pemagangan di mana kami mencoba menjawab tiga pertanyaan dasar yang selama ini program-program pelatihan kami itu sifatnya *scatter*.

Jadi, yang pertama kami ingin fokus bahwa kita harus ada konsentrasi pelatihan untuk *skill set* masa depan, yang *skill set* ini bisa berkembang terus. Yang kedua, kita perlu mengintegrasikan juga dengan pelatihan *soft skill* bahasa asing kewirausahaan. Jadi, selama ini pelatihan itu dibuat terpisah, modul yang terpisah. Dan kita juga ingin bahwa pelatihan kita itu mengatasi *mislink*, *mismatch* dengan kebutuhan industri sehingga, dan yang kemudian juga harus dilaksanakan secara masif. Jadi, ini empat hal, *checkpoint* yang menurut kami penting untuk kami bisa jawab terkait dengan apa yang akan menjadi fokus pelatihan kita untuk tahun ini. Ini adalah gambaran balai-balai besar yang kami miliki. *Next*.

Sehingga dari rumusan itu dan melihat beberapa potret, ya, sebelum saya sampaikan ini adalah potret, Bapak dan Ibu, menjawab, jadi pelatihan kita itu harus menjawab realitas saat ini. Yang pertama adalah tingkat pengangguran tertinggi pada usia 19-24 tahun. Realitas kedua, lulusan SMK memiliki proporsi pengangguran terbesar dibandingkan lulusan yang lain, proporsi. Dan yang ketiga, *mismatch* itu juga ternyata dilihat jurusan yang ada saat ini itu juga kalau kita lihat kenapa *mismatch*-nya cukup besar? Berarti ada sesuatu yang belum pas dengan kurikulumnya. Menjawab itu semua maka, *next*.

Ini rumusan kami, jadi kita sedang menuntaskan suatu paket program pelatihan *School to Work Transition* dengan 4 tema ini. Fokus, bukan berarti yang lainnya tidak, begitu, ya, tapi adalah fokus dalam artian kita ingin tema-tema ini menjadi unggulan pelatihan kami tahun ini dan kami membutuhkan kerja sama juga dengan lintas kementerian, Kementerian Pertanian, Kementerian Komdigi, dan seterusnya, Perhutanan, Kementerian Kehutanan untuk bisa mengekskusi ini.

Jadi, tema yang pertama itu adalah *smart operation*, itu pelatihan otomatisasi operasional perusahaan untuk peningkatan produktivitas. *Smart creative IT skill*, jadi pelatihan keterampilan kreatif berbasis teknologi IT, di situ ada *content creator*, pengembangan web, ada *basic AI* dan seterusnya, *agroforestry*,

pelatihan pemanfaatan hutan sosial, kita punya hutan sosial yang luas dan itu belum teroptimalkan sehingga kita bisa memanfaatkan itu lebih kepada pemanfaatan *resource* dan terakhir itu adalah pelatihan yang terkait dengan tuntutan kebutuhan *green jobs* ke depan. Kalau *smart operation* tadi ada *smart farming*, *smart office* dan seterusnya.

Rancangan program nasional ini, inilah yang kita sebut dengan *apprenticeship*, ya, magang, dalam konteksnya vokasi, nanti akan ada skema *online*, kemudian ada *offline* di BLK, kemudian selama 3 bulan itu di industri. Dan kami berharap industri itu bersedia menerima karena mereka datang dengan *project based learning*, jadi ada *skill* yang mereka bawa dan industri itu tinggal menyiapkan *case-case* mana yang kemudian mereka bisa bantu untuk diotomasikan, untuk kemudian disederhanakan, kemudian untuk diefisiensikan, dan seterusnya sehingga sesudah itu baru kami berikan sertifikasi atau mereka juga bisa membuat wirausaha sendiri.

Jadi, contoh, Bapak dan Ibu, misalnya kalau ada *building* di sini, ini masih manual. ya. Kita bisa latih di balai-balai kita agar mereka bisa merancang sebuah sistem otomatisasi ketika tidak ada orang di gedung ini maka kemudian lampunya otomatis mati. Kemudian AC-nya bisa otomatis mati, berapa jumlah orang itu bisa disesuaikan. *Smart farming* juga sama, ya, ini yang kemudian kita berharap *skill set* yang bisa menjawab kebutuhan ke depan dan ini bisa tetap akan dimanfaatkan dan akan terus berkembang ke depan. *Next*.

Dan inilah gambaran, kita akan memanfaatkan juga dukungan ekosistem digital yang kita sudah miliki saat ini. Ada Skillhub, ada Sertihub untuk sertifikasi, ada Karirhub, dan ada Bizhub. Dan semua ini terintegrasi menjadi suatu ekosistem yang kami miliki, menunjang Program *School to Work Transition* yang akan kita gulirkan. Lanjut. *Next*, ya. *Next*.

Sekarang kami masuk ke bagian yang ketiga, Bapak dan Ibu, evaluasi permasalahan pemutusan hubungan kerja PHK sektor industri padat karya pemerintah atau swasta. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Bapak/Ibu pimpinan Komisi IX, Anggota Komisi IX, ini adalah data PHK Nasional. Memang kalau kita lihat potretnya, 2020 itu Covid-19, ya, terjadi *peak* sebesar 386.000 sekian, 2024 naik 2023, ya, kemudian saat ini sudah terdata itu adalah sekitar 24.000. Jadi, sudah sepertiga, ya, sepertiga lebih dari, belum lebih, ya, sepertiga dari tahun 2024, ya. Jadi, kalau ada yang bertanya, PHK *year to year* gabungannya itu saat ini dibandingkan tahun lalu memang meningkat, ya, ini potretnya dan tiga provinsi terbanyak PHK, Jawa Tengah, Jakarta, Riau, dan tiga sektor terbanyak itu adalah industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, dan aktivitas biasa lainnya.

Tentu kita harus coba bedah, *next*, apa, sih, penyebab PHK. Ini adalah hasil data dari kami dan ada contoh perusahaan. Ternyata kalau kita lihat memang dari, ada 25 penyebab PHK yang mungkin 7 inilah yang dominan. Pertama karena memang perusahaannya rugi atau tutup karena pasar dalam negeri, luar negeri yang menurun. Relokasi, pindah, ya, mencari upah yang lebih murah. Kemudian ada kasus perselisihan hubungan industrial, tapi ini biasanya, apa, tidak massal dari satu perusahaan. Kemudian tindakan balasan pengusaha akibat mogok kerja, jadi ini hubungan industrial juga. Ada untuk efisiensi, perusahaannya tetap *survive*, tapi dia kemudian mengurangi jumlah orang. Kemudian ada yang, ya, melakukan transformasi, perubahan bisnis, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir itu adalah pailit karena beban terkait dengan kewajiban kepada kreditur dan seterusnya. Jadi, penyebab PHK juga beragam sehingga ketika kita ditanya mitigasinya seperti apa, tentu kita juga harus melihat *case by case*-nya seperti apa. Lanjut, *next*.

Ya ini adalah gambaran sektor industri yang mengalami tekanan dan potensial tumbuh, ini beberapa peta yang ada dan ini kami terus pertajam, sesuai dengan permintaan dari Komisi IX juga kalau tidak salah, terakhir, kita diminta memiliki peta risiko industri yang kemudian PHK-nya tinggi. Ini adalah potret sebagian yang kita miliki. *Next*.

Kemudian kami juga ingin sampaikan khusus terkait dengan TPT, ya, Industri Tekstil dan Produk Tekstil.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Sebenarnya kalau kita lihat PHK itu benar ada, dan juga PHK itu kemudian relatif lebih tinggi dari tahun lalu, tapi potret *real* juga menunjukkan bahwa investasi baru itu juga ada. Ini data dari Kementerian Perindustrian, kalau kita lihat terkait dengan survei dari Sakernas juga, jumlah tenaga kerja sektor industri pakaian jadi malah terjadi peningkatan, ya, Agustus 2024 dibandingkan dengan Agustus 2023. Tapi ini memang potret 6 bulan yang lalu, ya.

Kemudian jumlah tenaga kerja pada sektor industri tekstil itu relatif lebih stabil. Jadi, ini adalah gambaran yang lebih *real* bagaimana ada PHK dan kemudian ada pertumbuhan industri juga. Kalau kita lihat yang di kiri, investasi PMA, investasi PMDN, dan seterusnya memang ada peningkatan dan ada penurunan menunjukkan sebuah dinamika sehingga yang memang yang ditunggu dari pemerintah adalah antisipasi dan mitigasinya seperti apa. *Next*.

Yang pertama, terkait dengan langkah antisipasi dari pemerintah ada beberapa poin yang kemudian itu langsung di bawah koordinasi Menko Perekonomian. Itu terkait dengan kebijakan fiskal dan insentif pajak, stimulus

ekonomi, dukungan restrukturisasi utang, proteksi industri dalam negeri, diversifikasi pasar rupiah dan ekspor, dan digitalisasi dan inovasi. Saya mohon izin tidak berpanjang lebar di sini.

Dan kemudian juga spesifik, *next*, untuk industri padat karya, ini kami juga ikut dalam rumusan di Kemenko, bahwa ada fasilitas *tax allowance*, ada pembiayaan kredit investasi, ada insentif PPH Pasal 21, dan bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja di BPJS. Ini kita rumuskan di awal tahun 2025 dan *alhamdulillah* itu sudah jadi kebijakan sebuah upaya kita untuk melindungi industri padat karya. Walaupun tentu kita melihat ini harus terus kita *review* dan harus terus kita sempurnakan.

Dan terakhir, *next*, spesifik di bidang ketenagakerjaan, ini adalah upaya kami. Yang pertama, preventif kita sedang membuat peta risiko PHK dan kita mulai sesuai dengan arahan dari Komisi IX waktu rapat kami terakhir, kita mulai dari sektor industri dan nanti kita akan mengerucut kepada entitasnya, itu adalah perusahaan. Dan kita akan melibatkan dinas-dinas, ya, untuk keluar dengan *early warning system*, industrial sektor atau perusahaan yang kemungkinan besar PHK.

Dan saya ingin laporkan juga, *good news* perkembangan dalam 1 bulan terakhir, teman-teman dari Kementerian Keuangan juga siap *support* data terkait dengan pajak, ya, PPH 21. Sehingga dari situ kita juga bisa melakukan estimasi apakah sudah terjadi pengurangan jumlah tenaga kerja atau belum, trennya seperti apa dari suatu perusahaan sehingga kita bisa lakukan itu untuk mitigasi, melihat kemungkinan terburuk selanjutnya seperti apa. Itulah yang nomor dua, sinkronisasi data bulanan.

Jadi, ini adalah inisiatif baru dan kami mohon dukungan dan *support* dari Komisi IX. Dalam tim itu ada Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, BPS, dan Bank Indonesia, kita ingin ada data bulanan terkait dengan Ketenagakerjaan. Jadi, data bulanan itu tidak hanya inflasi atau indikator-indikator makro, tapi kita juga ingin ada indikator-indikator ketenagakerjaan. Berapa jumlah tenaga kerja per bulan, meningkatnya atau berkurangnya, datanya itu adalah integrasi tadi dari lintas K/L.

Kemudian penguatan koordinasi dengan dinas, ya, ini kita sedang merencanakan untuk melakukan rakor pada bulan ini. Kemudian peningkatan kualitas mediator hubungan industrial, kemudian penguatan tugas dan fungsi pengawas ketenagakerjaan. Ini upaya preventif yang sedang kami lakukan, termasuk juga yang sudah kita siapkan di awal tahun, itu adalah *alhamdulillah* PP Nomor 6 Tahun 2025.

Bagaimana dengan PP Nomor 6 ini menyempurnakan *benefit* manfaat dari JKP. Yang awalnya itu hanya 45% dari upah 3 bulan pertama ketika seseorang itu di PHK, sekarang 60% dari upah selama 6 bulan. Jadi, kalau seseorang itu dia, ya, anggota BPJS Naker, dia di-PHK, selama 6 bulan mereka mendapatkan uang tunai 60% selama 6 bulan. Dan, ya, manfaat pelatihan kerja yang awalnya itu hanya sebesar 1 juta kemudian menjadi 2,4 juta. Dan balai-balai latihan kerja kami itu terbuka sekarang, ya, jadi mereka ingin *upskilling*, *reskilling* terkait dengan apa, menu-menunya ada dan kita akan salurkan mereka untuk mendapatkan pelatihan, ya, apakah itu *offline* ataupun *online* tentu bisa.

Kemudian kami terus berusaha untuk memperbaiki informasi terkait tentang lowongan pekerjaan. Kalau secara *online* kami memiliki SIAPkerja dan secara *offline* kita memiliki *job fair* yang juga kita bekerja sama dengan dinas, dan terakhir layanan kewirausahaan.

Itu adalah gambaran, Bapak dan Ibu, upaya dan sekarang mungkin Bapak dan Ibu juga sudah mendengar di bawah koordinasi Menko Perekonomian dan Mensesneg sedang disiapkan terkait dengan Satgas PHK. Dan kita berharap Satgas PHK ini lebih, lebih luas juga tidak hanya bicara PHK, tapi juga sampai menarik ke hulu, itu karena terkait dengan penciptaan lapangan kerja. Lanjut.

Dan terakhir, saya mohon izin untuk masuk ke agenda yang keempat, terkait dengan program dan anggaran yang bersumber PHLN di Kemnaker. Jadi, Bapak dan Ibu, mengapa agenda ini kami usulkan, jadi kami mohon maaf karena ada suatu dinamika yang baru, ya, bahwa untuk PHLN, ternyata itu harus mendapatkan persetujuan, ini adalah Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang APBN Tahun 2025, bahwa harus mendapatkan persetujuan dari alat kelengkapan DPR. Yang awalnya, kami sudah siapkan sebagai rumah atau cangkangnya, ya, dan kemudian untuk itu *top-up*-nya, untuk penambahannya, sesuai dengan undang-undang, maka kami membutuhkan persetujuan dari Komisi IX.

Kami sudah, di anggaran, kita yang sudah kita sepakati, yang sudah ditetapkan, yang sudah disetujui, itu ada *project* LISTRAF sebagai cangkang sebesar 2 miliar dan pengembangan balai pelatihan vokasi dan produktivitas Banyuwangi sebesar 5 miliar. Itu awalnya memang untuk cangkangnya, untuk rumahnya dan untuk di *top-up* pada tahun anggaran 2025 ini, tapi karena tadi harus ada suatu mekanisme persetujuan, maka kesempatan ini kami gunakan untuk memanfaatkan dukungan dan *support* dari Komisi IX terkait dengan rencana.

Apa yang akan kami lakukan untuk *project* LISTRAF, kita akan sampaikan detail, yaitu ada butuh tambahan anggaran sebesar Rp117 miliar dan kemudian BPVP Banyuwangi sebesar Rp17 miliar.

Saya mohon izin untuk menyampaikan yang pertama, *project* LISTRAF. Jadi, *project* LISTRAF ini mulai dari tahun 2024, begitu, ya, hingga tahun 2027, itu dengan nilai sebesar 2,2T. *Project* ini dilatarbelakangi kebutuhan sistem informasi pasar kerja. Jadi, memang kalau kita lihat *best practice* dari luar negeri, Kementerian Ketenagakerjaan itu membutuhkan suatu *platform labor market information system* yang kuat. Jadi, tidak ada lagi calo pungli terkait dengan penempatan kerja dan seterusnya. Jadi, setiap orang bisa dengan mudah mencari info lowongan pekerjaan dalam sebuah platform. Dan itu kita masih belum sampai ke sana, kita harus terus memperbaiki dan di sinilah kemudian *project* LISTRAF itu menjadi rasional latar belakang, dan ini adalah pinjaman dari World Bank.

Jadi, *project* ini latar belakangnya itu adalah ada terkait dengan perpres, kemudian dan seterusnya. Dan *output*-nya adalah sistem informasi pasar kerja yang *handal, labor market observatory, public employment services*, dan pelatihan kerja. Jadi, ini termasuk juga untuk renovasi beberapa balai latihan kerja yang ada di Kemnaker. *Next*.

Komponen A, pengembangan sistem informasi pasar kerja yang andal, ini *output*-nya. Komponen B, pemanfaatan informasi pasar kerja. Komponen C, penguatan kapasitas kelembagaan, ya. Jadi, akan ada juga penguatan kelembagaan, mulai dari pendirian *project management* unit dan seterusnya.

Dan untuk tahun 2025, *next*, yang memang kami sudah alokasikan awal di Kemenkeu itu 2 miliar, ya, dan kita membutuhkan tambahan anggaran, ini adalah bantuan luar negeri untuk rincian kegiatan sesuai dengan *work plan* yang sudah di-*approve* oleh Bank Dunia sebenarnya tahun 2024 yang lalu, ya.

Jadi, ada revitalisasi arsitektur sistem, kemudian *adjustment* peningkatan kemampuan, pengumpulan, dan seterusnya, ini sebesar Rp117 miliar, ya. Dibandingkan dengan anggaran Kemnaker yang Rp2,6 triliun sebenarnya, ya, lumayan, sih, ya, untuk kita kemudian tambahannya.

Kemudian kami izin yang kedua, itu adalah proyek BPVP Banyuwangi. Ini adalah pinjaman dari Austria, ini juga sudah berjalan. Kalau tadi LISTRAF dari 2024, kalau BPVP ini tahun 2023 sebenarnya, jadi sudah, apa, kesepakatannya. Jadi, pengembangan pelatihan vokasi di Banyuwangi untuk bidang *welding*. Jadi, Bapak dan Ibu, *welding* ini kebutuhannya besar di luar negeri. Kebutuhannya besar, dan memang Banyuwangi dianggap sebagai salah satu nanti pusat untuk pelatihan *excellent* untuk *welding*, termasuk juga *tourism*.

Kemudian skema yang waktu itu disepakati tahun 2023, pinjaman itu untuk empat komponen utama, pengadaan peralatan pelatihan, pembangunan gedung, *training services*, dan asistensi oleh ekspor dari Austria. Alokasi awal yang sudah kita taruh di anggaran Kemnaker 5,4. Kemudian kita membutuhkan tambahan Rp17 miliar untuk tambahan anggaran, untuk *training services*, asistensi, dan hubungan teknis. *Next*.

Dan ini adalah beberapa dokumentasi karena tadi sudah jalan dari 2023, ya, jadi sudah ada pembangunan gedungnya. Ini adalah sebagai laporan juga, gedung pariwisata untuk pengelasan. *Next*, lanjut, ya, lanjut, dan tahun ini kita butuh untuk program sebenarnya. Jadi, mulai melakukan program pelatihan dan asistensinya, ya. Ini sudah ada *Training of Trainers*, program pariwisata, *Training of Trainers* untuk program pengelasan yang dilakukan tahun lalu sebenarnya.

Baik, terakhir, ya, itu yang bisa kami sampaikan, Bu Pimpinan Sidang, Bapak dan Ibu Pimpinan Komisi IX, Bapak/Ibu Anggota, dan kami dari Kementerian Ketenagakerjaan mohon dukungan dari Anggota Komisi IX DPR RI yang terhormat, atas kebutuhan penambahan tambahan pagu pinjaman luar negeri Kemnaker Tahun 2025 untuk pelaksanaan LISTRAF dan pengembangan BPVP Banyuwangi tadi.

Demikian yang bisa kami sampaikan, mohon maaf agak lebih dari 20 menit. Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih, Pak Menteri.

Kayanya Pak Menteri sengaja karena tahu yang akan memimpin rapat saya, jadi BPVP Banyuwangi sangat dipertegas karena kebetulan saya dapil-nya situ. Tapi bukan berarti saya nanti tidak boleh bertanya, loh, ya, Pak, ya, ini bagian dari pengawasan kita.

Terima kasih. Selanjutnya sudah ada beberapa Anggota yang daftar untuk melakukan pendalaman. Yang pertama saya berikan waktu kepada Pak Obon, selanjutnya Pak Obet.

Pak Obon, silakan. Persiapan, Pak Obet.

F-P. GERINDRA (OBON TABRONI):

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Terima kasih, Bu Pimpinan, Pak Menteri dan Rekan-rekan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Yang pertama, Pak, saya mengapresiasi atas apa yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja terkait dengan upaya-upaya pencegahan dan tentu selain pencegahan adalah solusi terkait dengan PHK.

Yang kedua, Pak, tentang *School to Work*. Program *School to Work* itu bagus memang. Bagaimana hari ini banyak adik-adik kita, mereka yang lulusan sekolah-sekolah tidak siap untuk bekerja sehingga diberikan sebuah program dari pemerintah mengatasi persoalan itu semua. Tujuan secara makronya adalah mengurangi pengangguran.

Tapi ada beberapa catatan, Pak. Yang pertama, persoalan ini bisa menjadi persoalan baru ketika kita tidak melakukan, mengawasi, dan membuat aturan yang bagus. Apa itu menjadi persoalan yang baru? Sebuah perusahaan pasti sangat *enjoy* menerima tenaga-tenaga pemagangan karena apa? Bila tenaga kerja pemagangan tentu pendapatan, atau upah, atau apa pun yang diterima pasti berbeda dengan pekerja yang ada.

Apa, sih, aturan-aturan yang bisa kita lakukan sebagai sebuah pengawasan? Yang pertama karena pemagangan sifatnya belajar, jangan disamakan waktu kerjanya dengan pekerja. Kalau pekerja satu hari bekerja 8 jam, magang bekerja 1 jam atau vokasi, ya, itu sama dengan bekerja. Yang kedua, jangan diberikan target. Kemudian yang ketiga, harus jelas di perusahaan itu, berapa persen waktu yang diberikan untuk melatih dan bekerja.

Katakan 40:60, 40% sifatnya lebih teori, kemudian 60% sifatnya kepada praktik. Sehingga bagi perusahaan tertentu yang punya kepedulian sosial bagaimana bangsa kita menjadi lebih bagus dalam wawasan, dalam *skill*-nya mereka tidak memperlmasalahkannya ini, tapi kalau perusahaan-perusahaan yang memang orientasinya menjadikan magang sebagai pekerja dengan upah lebih rendah, kemudian jam kerja sama, diberikan target, dan yang lain, nah ini akan, akan, akan disalahgunakan oleh perusahaan. Ini catatan, Pak.

Kemudian yang kedua terkait dengan PHK, Pak. PHK, yang memang kemarin-kemarin ini, kan, gencar sekali di beberapa media, di beberapa *platform* sosial, media sosial tentang soal Indonesia itu gelap, PHK dimana-mana. Ya PHK pasti terjadi, Bapak sampaikan tadi tentang penyebab-penyebab. Saya lihat, datanya juga ini dari Bapak bahwa di tahun 2023 ada 64.000, kemudian, itu yang ter-PHK. Sementara realitasnya, di sektor *manufacture*, ini dari Bapak juga, ada penerimaan sekitar 1,8 juta yang ter-rekrut, yang ter-PHK 64 ribu, tapi ada 1,08 juta, saya tidak mau memverifikasi apakah ini benar atau salah.

Ya lihat realitas yang ada, Subang BYD 18 ribu, kemudian saya bicara Jabodetabek saja. Belum lagi ketika sama-sama di bulan K3 itu di Batang, Pak, perusahaan baru muncul. Artinya sebetulnya, Indonesia, tuh, enggak gelap-gelap banget, ini menimbulkan rasa pesimis bahwa PHK-PHK, betul memang PHK ada, tapi juga pertumbuhan industri-industri *manufacture* yang baru juga itu ada. Nah bagaimana caranya juga supaya ini berimbang, PHK memang terjadi kita selesaikan, tapi juga banyak juga perusahaan-perusahaan baru.

Yang ketiga, Pak, tentang LISTRAF. Ada permintaan anggaran dari Rp2 triliun menjadi Rp117 triliun. Kemudian khusus BLK dari Rp5 triliun menjadi Rp17 triliun.

Oh iya, Rp117 triliun, 117, Pak, ya.

Nah ini dalam, dalam semuanya berjalan dalam 3 tahun, 3 tahun program. Ya sampaikan juga pada kami per tahunnya itu gambarannya bagaimana sehingga, kan, kalau tadi pembangunan sudah, kemudian proyeksi tahun ini apa, kemudian proyeksi-proyeksi tahun depan karena ini pun terkait dengan anggaran, ya tentu kita harus hati-hati terhadap ini.

Terima kasih, Pak.

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Terima kasih.

Selanjutnya Pak Obet, persiapan Pak Nuroji.

Silakan, Pak Obet.

F-PDI PERJUANGAN (OBET RUMBRUREN):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Pimpinan Komisi IX yang saya hormati,
Serta Anggota Komisi IX yang saya hormati,
Bapak Menteri yang saya hormati,
dan semua jajaran Kementerian Ketenagakerjaan yang saya hormati.**

Ini Papua Barat, Pak. Ini menurut data Badan Pusat Statistik, Papua Barat mencatat pengangguran di wilayah Papua Barat itu mencapai 13.702. Itu pada per Februari 2024, Pak. Angka ini menunjukkan bahwa 4,31% dari total angka pengangguran. Dengan demikian saya minta untuk menjadi perhatian pemerintah pusat untuk membuka balai latihan yang berbasis mikro.

Di dalam Asta Cita Presiden Pak Prabowo Subianto, terdapat 2 poin yang sangat relevan dengan sektor ketenagakerjaan. Yaitu satu, peningkatan lapangan kerja yang berkualitas, kemudian kedua, mendorong kewirausahaan dan seterusnya.

Kondisi saat ini di Papua Barat sedang terjadi adalah masih tingginya angka pengangguran, Pak, yang mengakibatkan tingginya angka kriminal, contoh jambret, begal, pencuri, dan perampokan, mungkin Bapak Menteri pernah dengar itu di Manokwari seperti itu dan saya sendiri tidak bisa mengatakan bahwa yang salah itu mereka-mereka itu, ini karena kesenjangan sosial. Orang lapar, makanya terpaksa melakukan itu dan yang korban adalah masyarakat.

Nah, oleh karena itu menjadi perhatian, ya, pemerintah pusat melalui Bapak Menteri. Saya mohon untuk khusus Papua Barat.

Demikian yang dapat saya sampaikan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih, Pimpinan Komisi IX.

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Terima kasih, Pak Obet.

Selanjutnya Pak Nuroji, persiapan Bu Sri Meliyana.

F-P. GERINDRA (Ir. H. NUROJI):

Terima kasih.

Pimpinan Komisi IX, serta Wakil Ketua Komisi IX, Bapak/Ibu Anggota yang saya hormati, serta para Pak Menteri dan seluruh jajaran dari Kemenaker.

Saya satu poin saja yang ingin dari sekian banyak persoalan yang ada yang ingin saya sampaikan terkait dengan gelombang PHK yang katanya cukup besar dan di sisi lain industri memang, terutama industri tekstil, ya, banyak yang tutup, walaupun ada juga yang bangkit, bisa bangkit kembali.

Nah, ini tidak lepas daripada persaingan global, saya rasa, ditutupnya industri ini karena tidak efisiennya dan ekosistem usahanya yang tidak mendukung. Nah, ini saya rasa perlu catatan tersendiri untuk memperhatikan sektor ini sehingga, karena ini satu industri yang padat karya juga yang menyerap banyak puluhan ribu orang, ya, sehingga perlu penanganan yang lebih cepat sehingga usaha-usaha di bidang tekstil dan industri tekstil lainnya itu bisa bangkit.

Terutama pengaturan juga bahwa dari segi harga atau daya beli kita sedang menurun, kemudian dari segi produk, tampak sekali jauh berbeda, ya, dengan produk-produk yang masuk ke Indonesia, produk-produk yang legal maupun yang ilegal, ya, seperti pakaian dan barang-barang lain, ya. Nah, ini yang mungkin menyebabkan industri tidak lagi mampu bertahan dari segi penjualannya dan ini perlu dikaji. Apakah ada satu kelemahan di kita ekosistem investasinya yang belum mendukung dan itu perlu dirapikan lagi sehingga, atau kalau di luar negeri atau di negeri yang bisa memberikan harga murah, bersaing di Indonesia itu ada semacam subsidi dari pemerintah kah? Atau memang hasil-hasil produksi yang murah, begitu. Ini juga perlu, saya belum, belum, belum bisa memahami. Sehingga jauh sekali harga itu dibandingkan dengan harga di dalam negeri, produksi di dalam negeri.

Termasuk aturan, apa ya, barang-barang *thrifting*, ya, yang barang bekas masuk ke Indonesia itu, impor barang bekas, nah ini baju-baju bekas terutama, ini sangat memukul industri atau perusahaan-perusahaan garmen yang memproduksi tekstil dan perlu ketegasan, ya, pengaturan. Di sisi lain memang ini juga penyerapan tenaga kerja, yang jualan baju-baju *thrifting* ini makin banyak di desa, bahkan sudah masuk ke desa-desa. Sementara ada aturan untuk larangan memasukkan barang-barang seperti ini.

Terus yang kedua soal pekerjaan mandiri yang juga bagian dari angkatan kerja kita, terutama generasi yang saat ini, apa disebutnya, generasi apa, ya, saya enggak mengenalnya. Yaitu generasi yang sudah memahami teknologi digital, lebih banyak memanfaatkan kemampuan kreativitasnya dibanding memilih bekerja dalam perusahaan atau pabrik, dia bisa membuat, menciptakan lapangan

pekerjaan sendiri, ya, seperti *start-up*, *start-up* di bidang desain dan lain-lain yang sudah banyak tumbuh juga.

Nah, ini ekosistemnya harus dibangun, tentu dengan, bekerja sama dengan kelembagaan lain, kementerian lain. Tadi sudah disampaikan beberapa kementerian bersinergi untuk menangani pengangguran, sebetulnya bukan pengangguran, mereka sudah bekerja, apakah mereka tercatat sebagai pengangguran, itu saya juga belum memahami. Ekosistem ini baik, makin banyak anak-anak muda yang tidak berpikir lagi bekerja di perusahaan.

Saya rasa itu saja, Ibu Ketua. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih.

Selanjutnya Bu Sri Meliyana, persiapan Bu Rahmawati.

F-P. GERINDRA (Ir. SRI MELIYANA):

Terima kasih, Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Pimpinan dan Anggota Komisi IX yang saya sayangi dan banggakan,
Pak Menteri beserta jajarannya yang kami hormati.**

Kami juga mengapresiasi secara teori sudah begitu banyak upayanya, Pak, secara teori, karena ini semua akan kita uji pada praktik pada masa yang akan datang. Kalau melihat pengalaman kami, Pak, kalau kita bicara tentang data-data, Komisi IX ini adalah komisi yang terus-menerus berhubungan dengan data, Pak, data BPJS, kesehatan, ketenagakerjaan, dan lain-lain.

Dan sampai kemarin, periode kemarin, kami belum mendapatkan data yang maksimal, belum mendapatkan. Nah, Bapak kemudian akan bekerja dengan data-data itu, terutama untuk RTKP, untuk WLKP, kalau pada halaman 6 itu, Pak, kita lihat Jawa Barat saja, yang ketahuan WLKP-nya maksudnya 398.417, ya, Pak, itu cara membacanya. Jadi, di Jawa Barat 398.000 yang sudah wajib lapor. Tapi yang

punya RTKP baru 26.000. Begitu membacanya, Pak Menteri? Itu di Jawa Barat, di DKI, di Jawa Timur, di Jawa Tengah, dan di Banten. Kok Sulawesi Selatan juga sudah mulai muncul garis birunya itu, Pak? Sementara ke bawahnya itu semakin pendek garis birunya.

Nah, ini menurut saya tugas yang sangat besar, Pak. Kalau di pusat, tadi ada bagian-bagiannya pusat melakukan apa, kabupaten melakukan apa, provinsi melakukan apa, dan kabupaten melakukan apa. Kalau pusat mendapatkan data seperti ini, Pak, saya enggak tahu apa yang terjadi di provinsi, apalagi di kabupaten, Pak.

Nah, jadi ini secara teori kita pahami, *oke*, Pak. Nah, yang kami ingin titipkan implementasinya, Pak. Bagaimana mendapatkan data yang halaman 6 ini saja dulu, untuk 10 provinsi tertinggi misalnya. Karena ini jauh banget, Jawa Barat 395 atau 8 itu, Papua Selatan 53.000. Dan harapan kami ini menjadi perhatian khusus, Pak, karena kita akan bergerak dari laporan-laporan data yang seperti ini, dari waktu ke waktu. Nah, jadi untuk membenahi halaman 6 ini saja, saya pikir tenaganya luar biasa, tapi saya juga ingin ber-optimis seperti Bapak-bapak karena ini pemikiran baru kita.

Kemudian kegiatan dan evaluasi kegiatan tahun 2024 dilaksanakan secara *offline* pada Juli dan Agustus. Sudah ada evaluasinya belum, Pak, yang halaman 7? Itu dilakukan secara *offline*, berhadap-hadapan, karena efisiensi, Bapak akan melakukannya secara *online*, daring. Saya tidak tahu kalau batas provinsi, Pak, tapi batas kabupaten saya mengkhawatirkan ini. Untuk itu, penguatan-penguatan terhadap daerah sampai ke kabupaten, sosialisasinya dan lain sebagainya, Pak, merupakan modal kita untuk merealisasi rencana-rencana ini.

Jadi, kabupaten itu, karena kami mewakili 11 kabupaten/kota, Pak, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, betapa mereka urusan dengan data-data, pembinaan, saya tidak tahu apakah SDM-nya cukup untuk membina-membina dan lain-lain ini. Nah, ini menjadi PR besar juga bagi kementerian, tentu.

Kemudian untuk *School to Work*, *School to Work*, Bapak juga menyebut kolaborasi, ini memang satu-satunya jalan, Pak. Tidak ada lagi di antara kita yang bisa berjaya dengan ego sektoral, tidak ada lagi di antara kita yang bisa berbangga dengan diri sendiri, maka kolaborasi adalah satu-satunya jalan, Pak. Selain saling pengertian juga di situ ada percepatan dari masing-masing rencana.

Kemudian program *School to Work*. *School to Work itu* kalau bicara *school* sampai umur berapa, Pak? Kalau Bapak bilang 19-24, maka yang disebut *school* itu sampai perguruan tinggi. Atau hanya SMK saja? Karena ini ada rentang umur yang tingkat pengangguran tertinggi terdapat pada usia 19-24 tahun. Sehingga

school itu kami ingin bertanya, apakah sampai SMK saja, atau sampai diploma, atau mungkin harus kita *link and match*-kan sampai ke perguruan tinggi, untuk *School to Work*.

Ini juga bagus sekali, Pak, karena komis, pendidikan itu dulu pernah mem-primadonakan SMK, Pak, primadona, walaupun memang penyediaan sarana dan prasarananya terseok-seok. Tapi masyarakat tidak tahu dengan penyediaan sarana dan prasarana, Pak. Masyarakat cuma tahu bahwa kalau SMK itu bisa bekerja dan pada kenyataannya SMK punya pengangguran paling tinggi. Ketika dia lulus SMK itu, Pak, maka persoalannya bukan pendidikan lagi. Persoalannya adalah di ketenagakerjaan.

Jadi, kita menerima limpahan itu, Pak, bagaimana Bapak membuat, membuat satu inovasi kalau kreativitas saja tidak cukup untuk urusan ini, Pak. Karena tiba-tiba di sekolah dia tanggung jawab pendidikan, tapi ketika tamat dia tanggung jawab ketenagakerjaan. Jadi, saya ingin gambaran *School to Work* itu dari mana ke mana.

Kemudian padat karya, Pak. Padat karya ini, ya, semakin memprihatinkan, digitalisasi dan lain-lain, dan lain-lain, maka dia akan meminggirkan padat karya. Yang punya padat karya itu Indonesia, Pak, kita yang penduduknya banyak. Sehingga kalau negara lain tidak memikirkan itu lagi, kita tetap harus memikirkannya, Pak. Tenaga kerja kita yang *skill*-nya rendah memang belum bisa bersaing dengan digital dan lain-lain, maka itu tetap harus menjadi pemikiran kita. Kalau tidak, maka pengangguran tidak bisa kita bayangkan lagi. Jadi, kami harapkan dengan sangat, bahwa ada pemikiran yang bersesuaian dengan kultur kerja di negara kita.

Nah, dan kemudian tentang, tentang 2 urusan pinjaman, ya, Pak, ya, tadi, LISTRAF dan BPVP Banyuwangi. Kalau ini di, di, Bapak tulis di sini bahwa proyek ini telah disepakati, berarti telah disetujui *by* waktu pelaksanaannya maupun besaran pelaksanaannya. Pertanyaan saya sekarang apakah kita minta lagi, atau uang yang dulu belum habis sehingga kita minta dikeluarkan tambahannya, begitu. Saya ingin kejelasan itu. Kalau saya hitung-hitung, pada total kesepakatan pinjaman selama kurun waktu 2023-2025.

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Izin.

Waktu, ya, Bu.

F-P. GERINDRA (Ir. SRI MELIYANA):

Satu, tinggal dikit lagi, tentang Banyuwangi, Bu Nini.

Total kesepakatannya itu sepuluh ribu delapan, eh 10.800.000 Euro, 184 miliar, ya, Pak. Yang keluar itu baru 72 miliar, 89 miliar, dan disetujui 5 miliar. Kalau saya, kalau saya jumlahkan dengan penambahan lagi di 17 miliar yang Bapak butuhkan, maka jumlahnya 178 miliar. Berarti masih bagian dari 184 miliar itu. Berarti ini persetujuannya untuk mencairkan lagi dari pinjaman yang memang sudah disetujui oleh luar negeri. Begitu, Pak?

Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih, Ketua.

Ini yang dapat kami elaborasi. Semoga yang Bapak cita-citakan, terutama anggaran-anggaran ini bisa segera terealisasi dan sehingga tidak mengganggu rencana ke depan yang lebih besar.

Demikian, Ketua.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.

Selanjutnya, Bu Rahmawati. Persiapan, Pak Surya Utama.

F-P. NASDEM (RAHMAWATI HERDIAN, S.H., M.Kn.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati para Pimpinan Komisi IX dan seluruh Anggota Komisi IX, Dan yang saya hormati Bapak Menteri dan juga Bapak Wamen Ketenagakerjaan beserta seluruh jajarannya.

Di sini ada beberapa hal, Pak, yang ingin saya sampaikan, yang pertama terkait dengan PHK. Dari data yang saya terima, menunjukkan bahwa jumlah pekerja yang terkena PHK telah mencapai angka yang signifikan, baik di sektor formal maupun informal. Tercatat pada periode Januari sampai dengan Desember 2024, terdapat 77.960 orang tenaga kerja yang ter-PHK.

Selanjutnya, dua bulan pertama, pada tahun 2025, Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan sudah ada 18.610 orang kehilangan pekerjaan. Dan yang paling berdampak ialah sektor industri pengolahan, termasuk tekstil dan garmen.

Yang menjadi pertanyaan saya, Pak, apa langkah konkret yang diambil pemerintah untuk mendukung sektor-sektor industri yang paling terdampak PHK? Terutama dalam hal pemberian intensif atau kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan sektor tersebut.

Lalu selanjutnya, Pak, saya ingin memberikan usulan kepada Pak Menteri terkait dengan adanya penahanan ijazah karyawan di perusahaan yang belakangan ini menghebohkan kita, Pak, bahwa adanya penahanan ijazah di beberapa perusahaan. Saya ingin mendorong agar adanya *hotline* pengaduan masyarakat di setiap provinsi. Mungkin kasus seperti itu bisa terjadi di berbagai daerah, akan tetapi belum mendapatkan perhatian secara khusus oleh pemerintah.

Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.

Selanjutnya, Pak Surya Utama. Persiapan, Bu Arzeti Bilbina.

F-PAN (SURYA UTAMA, S.I.P.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih.

Pimpinan Komisi IX dan juga Teman-teman Anggota Komisi IX yang saya cintai.

Selamat pagi juga Pak Menteri, Pak Wamen dan seluruh jajaran dari Kementerian Tenaga Kerja.

Saya sebetulnya tertarik ini dengan program *School to Work Transition*, dan tapi saya di sini juga ingin berbicara soal sebetulnya Indonesia ini diuntungkan dengan bonus demografi yang di 2030 itu kalau enggak salah lebih dari 68% adalah penduduk usia produktif, Pak, tapi jumlah penduduk usia produktif ini menurut saya tidak cukup karena perlu adanya strategi arah pertumbuhan ekonomi ke depannya dan disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki Indonesia dengan SDM-nya juga.

Nah, menurut saya juga banyaknya pengangguran dan juga PHK yang terjadi di Indonesia ini adanya *mismatch* atau tidak adanya *matching skill* antara *skill* dari SDM-nya dengan lapangan pekerjaannya dan tadi bilang soal bonus demografi, ada contoh beberapa negara yang gagal memanfaatkan bonus demografinya. Salah satunya adalah Brazil dan *South Africa*, di mana tingkat pengangguran tinggi ini karena arah kebijakan pemerintah yang salah dan juga tidak sesuai dengan kualitas SDM-nya.

Nah, jadi kalau kita mau bicara soal balai vokasi dan juga program *School to Work Transition*, saya pikir perlu adanya penyesuaian dengan perkembangan teknologi di masa datang. Karena perkembangan teknologi di masa mendatang ini cepat atau lambat akan berpengaruh dan juga menentukan lapangan pekerjaan yang akan dimiliki oleh suatu negara. Sudah terjadi di Indonesia sepertinya, kaya ojek pangkalan sudah jadi ojol, terus orang beralih dari toko fisik ke toko *online*, terus ada *call center* sekarang sudah ada mesin penjawab otomatis, terus digital bank juga saya pikir akan menghilangkan kebutuhan *teller* cepat atau lambat. Dulu uang *cash*, sekarang sudah *cashless*.

Dan di luar negeri sudah, dan di Indonesia juga sudah ada kayak mesin minuman, mesin rokok, sudah *vending machine*. Terus pembersih pakai robot, di Jepang polisi saja mengejar maling sudah pakai anjing robot, begitu, kan. Jadi, saya pikir ini harus dipikirkan dan anak-anak muda sekarang itu harus pintar untuk meng-*upgrade skill*-nya, untuk mengikuti perkembangan jaman.

Nah, ini yang harus dipikirkan untuk pelatihan-pelatihan vokasi tersebut, Pak. Coba, bagaimana kita melihat dan juga sebelum memikirkan lembaga vokasi yang akan dibuat, ini mencoba melihat bagaimana minat-minat para pelajarnya. Misalnya yang punya minat IT, ini bisa diarahkan untuk *artificial intelligence* atau AI, atau mungkin *game coding*. Terus yang jago sosmed, kan sekarang anak-anak muda, nih, daripada jadi netizen, mendingan *diajarin* bagaimana caranya mereka belajar untuk bisa jadi digital *marketing* yang hebat karena ini kebutuhan yang menurut saya tidak bisa digantikan oleh robot.

Terus yang suka gambar, bisa diajarkan desain grafis, *digital advertising*. Yang suka *fashion*, jahit desain, bisa dilatih untuk membuat *own fashion brand*

sendiri, dan juga diarahkan untuk pameran, jualan *online*, dan sebagainya. Terus yang hobi jualan, misalnya diajarkan bagaimana mereka memiliki *channel-channel* jualan *online* dan harus bisa *cashless*. Dan juga bagaimana Kementerian Tenaga Kerja juga harus berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga yang lainnya untuk bagaimana mendapatkan kredit mikro yang bunganya tidak mencekik untuk mereka yang dilatih wirausaha di vokasi-vokasi, tapi mereka harus berlanjut ke punya usaha, begitu, Pak.

Nah, sebetulnya ada lagi, nih, yang sempat saya tahu ada program *triple win*, pengiriman perawat ke Jerman, yang sudah berlangsung beberapa tahun terakhir, tapi ini kayaknya tidak dimanfaatkan baik oleh kita. Yang saya tahu sudah berapa tahun, tapi hanya berapa, tidak sampai 300 orang yang sudah berangkat, eh berapa ratus orang, lah, yang memanfaatkan program ini. Saya pikir, kenapa? Mungkin mereka tidak dilatih untuk kemampuan bahasa Jermannya, padahal gajinya saya tahu besar di sana. Bagaimana kita memikirkan untuk sekolah-sekolah vokasi atau pelatihan vokasi, untuk orang-orang yang mau jadi perawat, sudah diarahkan dari SMK dan selanjutnya untuk kurikulum berbahasa Jerman.

Nah, ada juga yang saya baru tahu, beberapa bulan yang lalu, sudah ada penandatanganan MoU antara Menteri KP2MI dengan Amerika, ada perusahaan Amerika untuk mengeksport perawat-perawat kita ke sana dan gajinya gede, loh, Pak, di sana bisa 7.000 sampai 9.000 dolar dan itu sudah dimanfaatkan oleh Filipina.

Bagaimana juga di vokasi-vokasi ini, ya itu, dimanfaatkan program-program yang sudah ada, G2G, atau *Government-to-Government* pengiriman tenaga kerja *skilled* untuk di vokasinya, kurikulum berbahasa Inggris dan lain sebagainya.

Saya pikir itu saja, jadi biar program *School to Work transition* ini dan lembaga vokasi ini harus bisa melahirkan orang-orang yang punya *matching skill* dengan lapangan pekerjaannya.

Itu saja, terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.

Selanjutnya, Bu Arzeti Bilbina. Persiapan, Pak Ahmad Safei.

F-PKB (Dr. Hj. ARZETI BILBINA SETYAWAN, S.E., M.A.P.):

Terima kasih, Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Yang sangat kita cintai, kita banggakan, Pimpinan Komisi IX Pak Menteri beserta jajaran, dan juga sahabat-sahabat Anggota Komisi IX.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Menteri, baik, baru saja kemarin kita melewati May Day atau Hari Buruh, tepatnya di tanggal 1 Mei, dan ada kegaduhan yang memang kita bisa melihat di beberapa berita terkait mengenai May Day ini, terutama di Dapil saya, Jawa Timur, Surabaya, Pak Menteri. Memang ada tiga poinnya yang diperhatikan lebih jauh oleh para pekerja atau buruh kita, yaitu bicara mengenai UMK, *outsourcing*, dan juga mengenai pengawasan.

Kalau kita bicara mengenai upah minimum kota ini, ya memang pertimbangan dari para pekerja adalah tingkat inflasi yang *real* saat ini yang ada di lapangan dan bicara mengenai *outsourcing* yang diharapkan oleh para pekerja kita karena memang sistem yang dibuat dalam *outsourcing* ini, mereka tahu bahwa ini belum ada kepastian, baik itu mengenai kesempatan dalam, ketidakpastian dalam pekerja, upah minimum, upah yang sangat rendah dan juga minimnya untuk perlindungan terhadap pekerja kita.

Dan ketiga adalah bicara mengenai pengawasan pelanggaran terhadap hak pekerja kita. Saat ini memang banyak sangat terjadi pelanggaran-pelanggaran hak pekerja, ya, Pak, ya, termasuk kita tahu soal jam kerja, upah tidak dibayar, dan PHK sepihak, dan juga pastinya kalau kemarin kita juga mengapresiasi langkah tepat yang sudah dilakukan dengan sidang tepatnya di tanggal 17 April ke Surabaya, Pak Wamen. Saya mengapresiasi sekali, Pak Wamen, walaupun sedih saya ketika Pak Wamen masuk pun tidak dibukakan pintu dan tidak mengetahui bahwa Bapak adalah dari keberpihakan pemerintah untuk ada, untuk melindungi para pekerja.

Nah, seperti ini tentunya memprihatinkan ketika berita itu disebar dan kita juga bisa melihat dan membaca. Saya cuma hanya ingin tahu satu saja poin Pak Menteri, bahwa mungkin, enggak, Pak, Menteri punya *roadmap* besar untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang selama ini terjadi. Bicara mengenai tiga poin tadi yang sudah saya sampaikan. Karena keprihatinan kita ini, kan, bicara

pasti langkah apa yang sudah akan dilakukan oleh Pak Menteri, terutama untuk Kemnaker itu sendiri.

Mungkin tiga poin itu dulu yang akan saya sampaikan. Terima kasih.

*Ihdinash shirathal mustaqim,
Wallahul muwaffiq ila aqwamitthariq,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Silakan, Pak Ahmad Safei. Selanjutnya persiapan, Bu Teti.

F-PDI PERJUANGAN (H. AHMAD SAFEI, S.H., M.H.):

Baik, terima kasih, Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera untuk kita semuanya.*

Bapak/Ibu Pimpinan yang saya hormati, Teman-teman Anggota Komisi IX, Pak Menteri, Pak Wamen, Pak Sekjen dan seluruh jajaran dan seluruh hadirin yang *insya Allah* dirahmati oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.

Pertama saya ingin sampaikan, Pak, tapi ini mungkin agak di luar konteks dan pembahasan kita hari ini, yaitu terkait dengan keberadaan tenaga kerja asing. Saya dari Dapil Sulawesi Tenggara, Pak, di sana cukup marak tenaga kerja asing ini dan kemarin ketika perayaan May Day itu luar biasa, Pak, ini aksi oleh teman-teman pekerja kemarin luar biasa di sana, memprotes terhadap ini.

Isu utamanya adalah bahwa tenaga kerja asing yang bekerja di sana itu datang dengan menggunakan visa wisata. Nah, ini saya ingin kepastian ini dari Bapak terkait dengan isu ini, apa benar ini bahwa mereka datang dengan menggunakan visa wisata, bukan visa kerja? Kalau ini benar, saya ingin mengkonfirmasi ulang bahwa apa ini sejalan dengan regulasi kita, dibenarkan oleh regulasi yang ada di kita terkait dengan penerimaan tenaga kerja? Kalau tidak dibenarkan, saya berharap bahwa ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah

dan lalu tentu oleh Kementerian Tenaga Kerja terkait bagaimana menyelesaikan masalah ini.

Karena ini masalah yang terjadi konfliknya itu antara tenaga kerja asing dengan tenaga kerja lokal. Karena kita melihat pekerjaan yang mereka lakukan di sana itu, saya kira tidak spesifik-spesifik amat, tenaga kerja betul-betul, tenaga kerja yang sama pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh mereka, pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh tenaga kerja lokal, tapi kemudian diberikan kepada mereka. Dan ini terjadi apa? Ini saya minta, dan kalau bisa ada waktu mungkin Pak Wamen atau, Pak Wamen atau Pak Menteri bisa berkunjung ke sana, kita sama-sama melihat, Pak. Di sana saya kira cukup banyak, karena kami di Sulawesi Tenggara kurang lebih 10 PSN (Proyek Strategis Nasional) di sana cukup banyak, Pak, dan ini, ya, saya kira perlu perhatian khusus.

Yang kedua, Pak, terkait dengan saya kira dengan kehadiran PSN ini 5-6 tahun terakhir di Sulawesi Tenggara yang saya kira akan membuka peluang kerjanya cukup besar juga, tapi persoalannya memang tenaga kerja lokal kita rata-rata tidak punya SDM. Oleh karena itu pada kesempatan ini, mumpung tadi juga saya rasa tadi sudah dibahas mengenai LISTRAF ini, Pak, pinjaman, kalau bisa juga mungkin diarahkan ke sana untuk membina BLK-BLK. Baik itu BLK dalam binaan Bapak, Kementerian, maupun BLK-BLK yang ada di Kabupaten agar supaya bisa memberikan peningkatan sumber daya manusia terhadap tenaga-tenaga lokal kita ini agar bisa diterima karena ini juga akan di sana jadi masalah juga, Pak.

Karena ini kita bicara Indonesia, ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa ini cuma tenaga lokal itu hanya di Sulawesi Tenggara. Tentu kita akan terima juga dari luar Sulawesi Tenggara dan kalau kita terima ini, ya ini akan jadi pesaing-pesaing di sana sebagaimana kita ketahui bahwa memang sumber daya manusia, teman-teman yang ada di sana memang sangat, masih sangat lemah.

Saya kira ini, Pak, terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Selanjutnya, Bu Teti. Silakan, Bu Teti.

F-P. GOLKAR (TETI ROHATININGSIH, S.Sos.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan, segenap Anggota Komisi IX yang saya hormati, Pak Menteri beserta jajaran yang pada hari ini hadir yang dirahmati Allah.

Ada beberapa pertanyaan, Pak, terkait, pertama adalah RTK Mikro yang di 18 provinsi. Sudahkah ada metode pendataan kebutuhan tenaga kerja lokal yang digunakan dalam RTK Mikro? Dan sejauh mana partisipasi perusahaan daerah dalam proses ini? Apakah sudah ada mekanisme pengawasan untuk mencegah tumpang tindihnya program RTK Mikro dengan program pendataan lainnya, baik di pusat maupun daerah? Apakah indikator keberhasilan yang ditetapkan dalam pelaksanaan RTK Mikro dan bagaimana pelaporannya ke Komisi IX.

Yang kedua, Pak, terkait skema *School to Work Transition*. Kementerian mana saja, Pak, yang telah berkomitmen secara konkret untuk mendukung skema transisi ini dan dengan bentuk kontribusinya? Dan bagaimana juga pengawasan terhadap program magang atau pelatihan agar tidak dimanfaatkan sebagai bentuk eksploitasi tenaga kerja murah. Apakah peta jalan atau *roadmap* nasional untuk implementasi transisi sekolah ke kerja terukur dan inklusif?

Yang ketiga, terkait PHK, sektor padat karya. Apakah langkah cepat spesifik bagi perusahaan terdampak PHK yang sudah dibantu penyelesaiannya oleh pemerintah? Sudahkah ada skema, bantuan, atau program *reskilling* bagi pekerja yang terdampak PHK secara massal?

Yang keempat, terkait PHLN, BLK Kemaritiman, dan Proyek LISTRAF Pak. Bagaimana mekanisme pemantauan evaluasi aktivitas, efektivitas penggunaan dana PHLN, khususnya untuk Proyek LISTRAF dan BLK Kemaritiman. Ada perbedaan indikator *output* atau *outcome* yang ditargetkan dari proyek ini tahun 2025. Apa perencanaan pengajuan tambahan dana tahun 2026? Bagaimana jaminan bahwa pelatihan di BLK Kemaritiman agar selaras dengan kebutuhan nyata di sektor kelautan atau logistik.

Itu, Pak, sementara pertanyaan dari saya, Ibu. Terima kasih.

Wallahul muwaffiq ila aqwamitthariq,

Wa ridho wal inayah,

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Selanjutnya dari meja Pimpinan. Silakan, Pak Yahya.

F-P. GOLKAR (M. YAHYA ZAINI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan yang saya hormati, para Anggota, Pak Menteri Pak Wamen dan seluruh jajaran.

Pertama, saya memberikan apresiasi atas kolaborasi yang telah dijalinan oleh Pak Menteri bersama dengan kementerian yang lain, tetapi saya melihat masih banyak peluang, Pak, yang belum disebutkan. Peluang itu langsung terkait dengan lapangan pekerjaan, misalnya MBG (Makan Bergizi Gratis), satu dapur mempekerjakan 47 orang, kali 5.000 rencana, apa, BGN yang akan membangun dapur 5.000, saya kalikan ada 235.000 tenaga kerja yang siap pakai di MBG. Saya kira ini harus masuk dalam RTK, apa namanya, Kementerian Ketenagakerjaan. Itu yang pertama.

Yang kedua, pemerintah juga akan membangun 80.000 koperasi merah putih di setiap desa. Kalau satu koperasi saja menampung 5 orang pengurus, itu sudah 400.000 tenaga kerja akan terserap, Pak, dan ini juga menurut saya perlu dimasukkan dalam skema, apa namanya, Kementerian Ketenagakerjaan.

Yang ketiga, pembangunan 3 juta rumah. Kalau satu rumah mempekerjakan 10 tukang saja, rantai pasoknya banyak ini, Pak, puluhan itu, kalau, apa namanya, industri perumahan ini. Tukang saja 10, 1 rumah, itu sudah 30 juta orang, Pak. Itu luar biasa itu selama 5 tahun, ya, 3 juta rumah.

Yang keempat, program hilirisasi yang sudah disepakati oleh pemerintah, yaitu 28 komoditas. Ini tolong dimitigasi, nih, Pak, sama Kementerian Ketenagakerjaan kira-kira bagaimana mempersiapkan tenaga kerjanya. Jadi, kalau ini bisa dilakukan, juga ini akan menampung lapangan pekerjaan mungkin ribuan sampai ratusan ribu tenaga kerja. Karena 28 komoditas itu bukan sedikit, tapi banyak, dan rantai pasoknya juga banyak, baik yang langsung atau tidak langsung. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya selalu didatangi teman-teman dari industri rokok, Pak. Industri rokok ini adalah industri padat karya, memang agak sensitif bicara industri

rokok di Komisi IX karena dimensi industri rokok itu selain aspek ekonomi dan tenaga kerja, juga ada aspek kesehatan. Di dapil saya saja, ada 7 pabrik rokok, Pak, yang menampung sekitar 15.000 tenaga kerja. Sedangkan sekarang, pemerintah sedang giat-giatnya untuk memperketat aturan terhadap industri rokok ini. Padahal kontribusinya terhadap cukai rokok itu sekitar Rp200 triliun setiap tahun. Beda dengan pajak, Pak, kalau pajak tarik di belakang, kalau cukai tarik di depan. Jadi, bayar cukai dulu baru memproduksi rokok. Nah, maksud saya, tolong ini karena tenaga kerja yang terlibat di industri rokok ini jutaan orang, Pak, menurut mereka itu 2 juta orang yang terlibat di industri rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Jadi, Pak Menteri, tolong bisik-bisik kepada Pak Menkes, Pak, kalau buat aturan jangan terlalu ketat. Mereka tidak anti regulasi, tetapi jangan mematikan. Sekarang isunya adalah isu rokok polos yang sedang digodok oleh Kementerian, apa namanya, Kesehatan. Saya titip kolaborasinya ditingkat, Pak, dengan Kementerian Kesehatan. Barangkali teman-teman yang tidak berani ini berbicara di Komisi IX mengenai rokok karena sensitif, tapi saya karena didatangi beragam macam, apa namanya, jalur, mulai dari petani, kemudian industri, sampai pelaku usahanya, maka saya sampaikan ini kebetulan adalah dengan Kementerian Ketenagakerjaan.

Yang ketiga, di Kementerian Perindustrian itu ada program 3 *in* 1, Pak, saya kira ini bisa dilakukan juga oleh Kementerian Ketenagakerjaan. 3 *in* 1 itu pertama pelatihan, yang kedua sertifikasi kompetensi, yang ketiga penempatan tenaga kerjanya langsung. Jadi, habis dilatih, dikasih sertifikat, langsung masuk menjadi pekerja, Pak. Nah, menurut saya ini perlu dilakukan juga oleh Kementerian Ketenagakerjaan, kuncinya adalah di industri, Pak. Beberapa kali saya membuka di dapil saya, Pak, rata-rata di industri sepatu yang banyak karena padat karya. Bahkan ada pabrik sepatu di Jombang itu yang produknya itu tidak dijual di dalam negeri, tapi dijual di luar negeri. Semuanya, ya, dan harga sepatunya mahal sekitar 2 juta ke atas.

Nah, tolong dipikirkan juga bagaimana kerja sama dengan industri untuk menghilangkan *mismatch* tadi seperti yang disampaikan teman-teman tadi, supaya ada program 3 *in* 1, langsung dipekerjakan. Jadi, kalau magang belum bekerja, itu, Pak, baru pemagangan. Ini langsung bekerja.

Saya kira itu, Bu Ketua. Terima kasih.

*Wabillahi taufiq wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Saya baru tahu kalau di Jombang itu ada pabrik sepatu, ada pabrik rokok. Saya tahunya pabrik gula. Pabrik gula.

Terima kasih.

Bapak/Ibu yang saya hormati.

Sebelum saya berikan kepada Pak Menteri, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, Pak. Ini terkait BPVP Banyuwangi, tadi disampaikan mengenai anggaran, cuma saya ingin fokus pada *output*-nya yang selama ini sudah dihasilkan seperti apa, Pak.

Karena terus terang, saya orang Banyuwangi, asli, dan saya, sepertinya tim saya belum ada yang, yang, tim saya dan orang-orang yang saya kenal belum ada yang, yang, yang menggunakan fasilitas dari BPVP ini untuk program-program yang pariwisata, pengelasan, dan sebagainya.

Saya sudah beberapa kali ke sana, cuman, apa, ini *output*-nya yang sudah dihasilkan seperti apa? Seperti contoh, sudah berapa yang tenaga kerjanya yang sudah bersertifikat, yang sudah dihasilkan, lalu penyerapannya seperti apa, dan sebagainya. Karena kalau soal pinjaman Austria-nya ini, anggarannya ini, kan, sebenarnya sudah teralokasikan, begitu.

Begitu saja, Pak, nanti selanjutnya sebelum saya berikan kepada Pak Menteri, saya tambah waktunya sampai 12.30, Ibu/Bapak? Ya.

(RAPAT: SETUJU)

Iya.

Silakan, Pak Menteri, untuk merespons beberapa masukan dan pertanyaan dari Anggota.

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Prof. YASSIERLI, S.T., M.T., Ph.D):

Baik, terima kasih, Bu Pimpinan Rapat.

Yang kami hormati sekali lagi, Bapak dan Ibu Pimpinan Komisi IX dan Bapak dan Ibu Anggota Komisi IX.

Yang cepat dulu, Bu Pimpinan, Bu Nini, BPVP Banyuwangi itu belum jalan, Bu, programnya. Jadi, baru ada gedung, alat, dan yang ada itu baru ToT, Bu, ToT untuk instrukturnya. Nah, jadi tambahan, bukan tambahan, ya, pencairan untuk tahun ini itu adalah untuk program, ya. Jadi, untuk program, nanti kita bisa survei bareng, ya, sama Bu Pimpinan, nanti ke sana. Jadi, belum ada, program, programnya belum ada, jadi baru selesai untuk fisiknya sama *Training of Trainers* untuk instruktur.

Kemudian yang tadi juga ada beberapa pertanyaan terkait tentang, apa, yang agenda nomor 4. Jadi, agenda nomor 4 itu bukan, ya, mungkin kami pertegas, bukan tambahan anggaran, tapi adalah persetujuan pencairan, ya. Alokasinya itu sudah, sudah, sudah disepakati itu, Bu Sri, ya, pencairan.

Awalnya, di awal tahun sebenarnya ketika tidak ada undang-undang, apa tadi, yang meminta persetujuan, Undang-Undang terkait APBN, kami kira itu sudah aman saja, begitu, ya. Jadi, kita taruh rumahnya nanti kemudian tinggal *topping*, tapi ternyata ada Undang-Undang APBN 2025, untuk pencairannya juga harus izin dari persetujuan dari Komisi IX. Atas dasar itulah kemudian kami memohon agenda ini.

Baik, saya akan mohon izin untuk mencoba menanggapi. Yang pertama dari, oh, Pak Obon enggak ada, ya, jadi bisa, ya.

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Atau menanggapinya tidak per orang, Pak, langsung per klaster pertanyaan temanya.

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Prof. YASSIERLI, S.T., M.T., Ph.D):

Baik. Baik, terima kasih, Bu Pimpinan.

Sebelum itu saya apresiasi dulu, ucapkan terima kasih dari sekian banyak, apa, respons dari Bapak dan Ibu Anggota Komisi IX, saya melihat semuanya ini adalah sangat, apa, sangat suportif, ya.

Kemudian juga banyak memberikan masukan, memberikan kemudian kepada kami beberapa ide terkait dengan apa yang bisa dilakukan, dan juga walaupun ada beberapa yang membutuhkan klarifikasi.

Kemudian yang berdasarkan ini dulu, terkait dengan RTK, banyak tadi adalah dari Bu Sri, ya, Bu Sri Meliyana. Jadi, memang WLKP ini menjadi PR, Bu, jadi memang itu sudah ada regulasi yang harus kami pastikan yang pertama, data terkait dengan jumlah perusahaan, ya. Jadi, memang ini semestanya besar ini, apakah ini masuk usaha kecil dan menengah juga, apa tidak, begitu, ya. Yang banyak, yang 5% ini adalah perusahaan besar, begitu, ya, perusahaan besar. Tapi ini realitas, saya setuju, Bu Sri, ini realitas.

Dan memang ketika kita kemudian datang ke kawasan industri, kawasan ekonomi, kita selalu mengingatkan bahwa Anda itu wajib, lho, wajib lapor, dan kita sudah siapkan sistemnya. Dan ini akan menjadi target kami, selain tadi kita juga harus lebih realistis, kita mungkin akan fokus ke perusahaan besar dan menengah dulu, begitu, ya. Perusahaan kecil, perusahaan mikro tentu itu tidak masuk, begitu, ya. Dan salah satu upaya kita, kita koordinasi dengan Kementerian Investasi dan BKPM, Bu, untuk memastikan data terkait dengan jumlah perusahaan itu tadi. Jadi, kami enggak punya, nih, sebenarnya, data perusahaan itu adalah di kementerian yang lain.

Kemudian RTK, ini memang kita akan jadikan sebagai program prioritas, sebagaimana di banyak kesempatan saya mengatakan bahwa kita itu belum punya *roadmap*, begitu, ya, *future jobs* itu seperti apa, sih, kebutuhannya. Dan pendekatannya sebenarnya tidak hanya *bottom-up*, kita juga bisa pendekatannya dalam skala agregat nasional, Bu. Jadi, terlepas dari kecilnya data RTK dari masing-masing perusahaan, kami juga harus memiliki skema *framework* untuk perhitungan *manpower*-nya itu untuk skala nasional. Dan yang sudah selesai kemarin adalah untuk *green jobs*, itu dibantu oleh Bappenas untuk perhitungan jumlah kebutuhan tenaga kerja untuk *green jobs*.

Hilirisasi dari Pak Pimpinan, Pak Yahya, tadi benar, Pak, ini PR kami. Kalau MBG, BGN kami sudah datangi, Pak, jadi sudah ada, datanya sudah masuk dan sudah ada MoU untuk terkait dengan, apa, rekrutmen, terutama di situ adalah ahli gizi dan akuntansi, begitu, ya. Tapi kalau rekrutmen terkait dengan tenaga dapurnya, kami lebih kemarin itu terkait dengan pelatihannya sebenarnya, Pak, dengan pemanfaatan balai-balai yang ada.

Kemudian Koperasi belum, kami belum memang. Kemudian kalau MoU dengan Kementerian Perumahan sudah, tapi baru konteksnya penyimpan rumah subsidi buat buruh. Untuk Kementerian Investasi Hilirisasi, ini memang belum, ya, SDM dan hilirisasi ini akan kami, apa, akan kami programkan untuk kemudian kita akan silaturahmi ke sana.

Jadi, memang sekali lagi, RTK Mikro ini baru menjadi salah satu upaya kita, sebenarnya ini lebih kepada perusahaan membantu mereka sehingga daerah juga bisa menyiapkan. Secara agregat makro, kita juga punya perhitungan yang sifatnya lebih makro, Bu Sri. Jadi, dua hal ini kita, kita, kita gunakan datanya. Tapi benar sekali lagi, data ini menjadi penting, ya, data menjadi penting. Kalau dilihat dari salah satu upaya kami untuk mitigasi PHK, kita sekarang sedang membentuk sebuah tim kecil, yang saya sampaikan tadi, Bu, dari Kemnaker, BPS, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, untuk kita bisa mendapatkan dinamika data bulanan terkait dengan ketenagakerjaan.

Dan *alhamdulillah* ini timnya sudah berjalan satu bulan, kami berharap suatu, ya, akan segera kita memiliki data tiap bulan. Jadi, tiap bulan ini, terutama yang data bulanan yang ada itu adalah data dari pajak sebenarnya, jadi kalau kemudian jumlah pajaknya berkurang, jumlah, apa, perusahaan itu, kan, melapor, ya, sekian orang yang bekerja, pajaknya sekian. Itu kalau kita tarik datanya, kita bisa melihat dinamika bertambah berkurangnya itu untuk sektor yang mana. Nanti divalidasi dengan data Sakernas, yang sekarang dua kali setahun, kita berharap nanti empat kali, ya. Ini sedang kita perjuangkan juga dengan BPS untuk pelaksanaan survei tersebut. Jadi, ini terkait tentang rencana tenaga kerja ke depan.

Kemudian yang kedua terkait dengan PHK, banyak sekali masukan dari Bapak dan Ibu. Kami berharap Satgas PHK yang ini sekarang sedang kita finalisasi menjadi bagian dari solusi strategis. Karena Satgas PHK yang sekarang kita usulkan itu tidak hanya Satgas PHK, tapi juga ada fungsi *monitoring* penciptaan lapangan kerja, jadi lebih luas dan usulan sementara itu, ya, lintas kementerian, kalau lintas kementerian tentu levelnya Menko yang mungkin akan mengkoordinasikan.

Tapi ini kita masih lihat, ya, arahan dari Pak Presiden terakhir seperti apa, tapi tadi usulan kami adalah ini adalah sifatnya lintas kementerian sehingga beberapa masukan tadi yang saya tangkap, begitu, ya, dari Pak Nuroji, begitu, ya. Memang ujung di hilirnya Kementerian Ketenagakerjaan, Pak, begitu, ya. Tapi beberapa hal, ada pertanyaan juga tadi dari, dari, bentar ya, terkait dengan apa yang sudah dilakukan, ya, Bu Rahmati, ya. Terkait dengan ada mitigasi yang sifatnya itu adalah konteksnya ekonomi, itu ada di paparan kami sudah ada, Bu, halaman, ya, intervensi pemerintah itu halaman, ya, halaman 22, 23, itu adalah upaya-upaya kita mitigasi terkait dengan, apa tadi, insentif yang diberikan oleh perusahaan, kemudian khusus untuk padat karya dan kemudian juga mitigasi yang sifatnya itu adalah upaya di bidang ketenagakerjaan dan gongnya nanti saya berharap adalah di Satgas PHK itu sendiri nanti, akan kita lihat. Itu terkait dengan PHK.

Kemudian *School to Work Transition*, Ibu, ya, Bapak dan Ibu, *School to Work* ini sebenarnya sesudah sekolah dan sebelum bekerja. Jadi, memang kita melihat ada *gap*, ada *gap*, jadi ternyata lulusan SMK, lulusan SMA, lulusan perguruan tinggi belum benar-benar siap untuk bekerja. Di sinilah peran dari balai, balai kita untuk menyiapkan itu. Sehingga pertanyaannya sama, tadi Pak Surya mengatakan pelatihan seperti apa, begitu, ya. Makanya yang sekarang kami godok itu, Pak, istilahnya *smart operation*. Jadi, itu adalah gambaran tadi, Gen Z sepertinya suka ini, ini merupakan *skill set* masa depan, ini bisa kita lakukan secara masif, dan *skill* ini juga berkembang.

Dan kita lihat memang SMK, perguruan tinggi, belum, nih, begitu, ya. Padahal kalau kita lihat, pelatihan AI itu 1 bulan bisa sebenarnya, pelatihan terkait dengan IoT 1 bulan bisa, nah, ini yang sekarang kami coba siapkan. Dan kami setuju magangnya itu bukan kemudian akan menjadi *cheap labor*, tapi magangnya itu adalah.

Eh, ada Pak Obon di sana, tadi saya lihat di situ.

Magangnya itu konteksnya adalah *project based learning*, Pak, ya. Jadi, dia datang ke perusahaan, dia akan membantu apa, begitu, ya. Jadi, sebenarnya konsepnya adalah dia *exercise* apa yang dia terima di balai, kemudian dia ambil *case*-nya di perusahaan, dia memberikan kontribusi ke perusahaan, sesudah itu baru kita berharap dia bisa direkrut oleh perusahaan.

Jadi, konteksnya kita batasi 3 bulan, 3 bulan, ya, nanti benar tadi masukan dari Pak Obon, kita harus kawal dalam regulasi waktu kerja, target, mereka tidak boleh bekerja di luar *project based* tadi, dan itu kita harus kawal, begitu, ya, jadi konteksnya seperti itu. Itu yang terkait dengan *School to Work Transition*.

Kemudian yang lain, Pak Obet, nanti memang PR kita adalah memberdayakan dinas tenaga kerja provinsi, Pak. Ini kami akan koordinasi *full* karena permasalahan terkait dengan pelanggaran norma ketenagakerjaan itu kita berharap sebenarnya peran dan dinas ketenagakerjaan provinsi itu besar, tapi kami sadar bahwa banyak yang kepala dinas provinsi itu belum siap, begitu, ya, memahami tupoksinya, kemudian kompetensinya, ya. Sehingga kami berkewajiban untuk membina dan kita akan lakukan dalam waktu dekat, kita akan kumpulkan, kita akan buat sesi pembinaan, ya, dengan mengumpulkan semua dinas provinsi. Belum lagi, benar tadi Bu Sri, ini baru provinsi, ya, dinas kota/kabupatennya *the next*-nya, tapi mungkin kita harus buat bertahap dulu, Bu, ini gambarannya, ya.

Ini Papua Barat. Ya, nanti, yang Papua Barat yang BLK, Pak, nanti kita inikan nanti.

Ada lagi yang lain?

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Mungkin kalau terkait data-data pendukung bisa disusulkan, iya.

F-PDI PERJUANGAN (H. AHMAD SAFEI, S.H., M.H.):

Yang klarifikasi, Pak Menteri.

Saya ingin klarifikasi tadi terkait dengan tenaga kerja asing yang gunakan visa wisata itu.

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Prof. YASSIERLI, S.T., M.T., Ph.D):

Itu Sulawesi, Sulawesi Utara?

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Bisa lewat Pimpinan, ya, Pak Safei, ya.

Iya. Ada yang perlu ditambahkan, Pak?

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Prof. YASSIERLI, S.T., M.T., Ph.D):

Boleh.

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Tenaga, tenaga asing, ya, Pak.

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Prof. YASSIERLI, S.T., M.T., Ph.D):

Tenaga asing.

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Mohon, Pak Menteri, ya.

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Prof. YASSIERLI, S.T., M.T., Ph.D):

Boleh, nanti kami cek, Pak.

Jadi, memang makanya ada Pak Wamen ini memang perlu ini, ya, jadi memang kita sudah bagi tugas. Pak Wamenlah yang akan banyak nanti inspeksi dan kasus kemarin penahanan ijazah seperti seperti cukup efektif, begitu, ya. Kita akan ada beberapa tema, Pak, Pak Safei, ya, jadi penahanan ijazah, ini tadi ada masukan, kita akan buat satgas, tapi kita melihatnya lebih besar kita akan buat sebuah kanal pelaporan ke Kementerian Ketenagakerjaan.

PKA, *the next issue*, Pak, ya, kita akan mulai dengan sidak nanti dan kemudian itu, ya, kita berharap juga itu akan menjadi sebuah ke, apa, kesadaran nasional. Nanti belum lagi pelanggaran-pelanggaran terkait dengan *outsourcing*, pelanggaran terkait dengan jam kerja, pelanggaran terkait dengan upah, dan seterusnya.

Jadi, apa, inspeksi sidak itu perlu kita lakukan. Sambil, kalau tadi ada yang bertanya juga terkait dengan *roadmap* apa, ya, yang penting yang kami sedang siapkan itu adalah terkait dengan status dan kompetensi pengawas ketenagakerjaan yang ada di provinsi Pak Safei. Jadi, apa ya, perpanjangan tangan kami itu ada dua, Pak, kepala dinas dan pengawas ketenagakerjaan yang ada di provinsi, termasuk juga mediator, ya, Bu Putri, mediator yang di provinsi. Ini yang kita harus bisa menyiapkan mereka kompetensinya seperti apa, kemudian bagaimana mereka memahami itu tupoksi mereka, walaupun secara jabatan mereka bertanggung jawabnya bukan ke kami kan, ya, mereka bertanggung jawabnya adalah ke pimpinan, ya, wilayahnya masing-masing. Di situ tantangannya, Pak Safei.

Jadi, silakan, Pak, nanti kalau lebih spesifik kita, ya, kita bisa inspeksi bersama dan tentu kita lihat, ya. Saya mendengar banyak, yang sudah kami lakukan sekarang adalah membuat lebih ketat, begitu, ya, terkait dengan izin TKA, izin TKA. Tapi, kan, kalau yang tadi, kan, visanya visa kerja, eh, visa wisata, terus tiba-tiba kerja, begitu, ya, belum tentu juga ada izin kerjanya. Ada juga yang izin kerja, kemudian sudah *expired*. Jadi, memang praktik-praktik seperti ini yang kemudian *law enforcement*, lah, menjadi solusinya.

Ada lagi yang lain?

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Saya menambahi. Jadi, kita periode yang lalu sudah punya Panja untuk TKA, ya, tenaga kerja asing. Dan kita sudah melakukan kunjungan beberapa kali sepertinya, sebelum Pak Safei bergabung di Komisi IX, ke Morowali, ya, Morowali, dan memang catatan luar biasa dan memang ini sepertinya Kementerian Ketenagakerjaan tidak bisa berdiri sendiri, harus kaitannya dengan Kementerian Imigrasi dan Kementerian K/L yang lain karena kaitannya dengan bukan hanya dengan persyaratan TKA, tapi juga di pintu masuknya ini, Pak, imigrasinya yang perlu kita perketat.

Jadi, saya pikir, saya sepakat dengan Pak Imam Safei tadi, Pak Ahmad Safei, bagaimana sebenarnya Kementerian Ketenagakerjaan ini harus berjejaring, harus memperkuat juga di persoalan masuknya dulu. Persoalan masuknya juga harus diperketat, bukan hanya soal bagaimana transfer, transfer *skill*-nya kepada masyarakat, tapi juga ketika masuknya itu juga harus diperketat, begitu.

Cukup, Ibu/Bapak?

Oh, silakan, Pak, Pak Sahidin. Mau menanyakan, silakan, Pak.

F-PAN (Ir. H. SAHIDIN):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan serta Anggota Komisi IX yang kami hormati, juga Pak Menteri, Pak Wamen, Pak Sekjen, ya, Bu Sekjen, ya, serta Eselon I.

Ada beberapa hal yang mungkin ingin kami pertanyakan, Pak. Sudah, Pak?

Baik, perkenalkan saya Sahidin, dari Fraksi PAN, sebelumnya saya di Komisi II, hari ini saya di Komisi IX, ya.

Terima kasih, Bapak/Ibu. Memang kami di Komisi IX ini.

Yang kita bahas ini, Pak, semuanya adalah peningkatan *skill* semuanya, hampir semua *skill*. Sementara, yang PHK, Pak, 77.000, ya, kebetulan juga di daerah saya di Riau, ini PHK-nya lebih kurang sama dengan DKI, hanya beda 1.000, tadi saya baca tadi.

Sementara di Riau ini, ini adalah sektor perkebunan dan industri pala. Kami melihat di lapangan, Pak, ya, dan juga menerima lapangan, apa, menerima laporan dari masyarakat. Banyak sekali sektor perkebunan ini tidak membayar, ya, atau, ya, memberikan kewajiban perusahaan seperti apakah itu gajinya, ya kan, apakah insentif, apa namanya, itu hampir tidak berlakukan itu. Tadi Bapak sampaikan, ya, bagaimana kita, ya, dengan dinas provinsi, kabupaten untuk bekerja sama. Selama ini pihak masyarakat, tenaga kerja, melaporkan ke dinas, ya, provinsi, ini mandek. Kalau diterima, ini persidangan ini cukup lama, sampai satu tahun. Akhirnya apa? Yang diputuskan hubungan kerja tadi, ya, menyerah tanpa syarat, atau menyerah begitu saja.

Nah ini apa langkah-langkah kita untuk menangani, ya, yang pemutus hubungan kerja tadi. Ini saya rasa benar-benar penting, ya, kalau kita tambah *skill oke*, tetapi yang sudah korban ini apa langkah konkret Pak Menteri untuk menangani itu.

Terima kasih, Pak.

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Terima kasih, Pak Sahidin.

Silakan, Pak Menteri untuk direspons sebenarnya sebelum kita masuk ke draf kesimpulan.

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Prof. YASSIERLI, S.T., M.T., Ph.D):

Baik, terima kasih, Pak Sahidin.

Yang sekarang kita siapkan itu kanal pelaporan, Pak, ya, jadi kanal pelaporan. Kenapa kita melihat kanal pelaporan, jadi kami sangat paham bahwa mandeknya itu tadi, Pak, jadi ada laporan, kemudian di-*follow-up*-nya lama dan seterusnya. Jadi, kanalnya itu kita tarik dulu ke pusat, sesudah itu baru setiap laporan itu kita distribusikan ke dinas sehingga kita tahu statusnya seperti apa. Kami melihat itu yang strategis yang pertama sekali yang harus kita lakukan dan ini kita akan *launching* segera, ya, jadi kanal lapor kepada kementerian.

Yang kedua tadi, penguatan SDM, dinas, dan pengawas sama mediator, Pak. Jadi, ini yang strategis, biasanya kita bisa laksanakan itu secara *offline* dan *insya Allah* tahun ini kita akan paksakan, lah, *on offline*, dengan mengundang, kita akan fokus pada kepala dinas dulu, dinas provinsi. Kalau kemudian pengawas dan

mediator kita bisa pembekalannya itu, ya, kita cicil, mungkin lebih banyaknya itu *hybrid* nanti, Pak Sahidin.

Jadi, dua itu yang konkret, dan kami memang sekali lagi karena Indonesia ini besar, Pak, jadi banyak sekali. Tadi Bu Pimpinan sudah menyampaikan memang kita perlu jejaring yang lebih banyak, begitu, ya, sehingga ini kalau dipetakan setiap provinsi masalahnya banyak sekali terkait tentang norma ketenagakerjaan. Belum lagi K3 Pak Sahidin, ya. Itu gambaran.

Begitu, Bu Pimpinan. Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Terima kasih, Pak menteri.

Selanjutnya kita buka draf kesimpulan, Ibu/Bapak.

Draf kesimpulan Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Senin 6 Mei 2025.

Ini untuk, izin, Pak Menteri, untuk Pimpinan dan Anggota Komisi IX dulu, ya, sebelum kita berikan kepada Pak Menteri. Kita sepakati dulu di Komisi IX dulu, di Pimpinan dan Anggota.

1. Komisi IX DPR RI mendorong Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia melakukan akselerasi program rencana tenaga kerja RTK Mikro di 18 provinsi dengan dukungan kesiapan perusahaan dalam perencanaan strategis, alokasi sumber daya, koordinasi lintas sektor di setiap provinsi untuk menetapkan tim pelaksana, mengidentifikasi kebutuhan lokal, serta menyusun indikator kinerja utama yang realistis dan terukur tersistem dalam aplikasi Wajib Laport Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP).

Bapak/Ibu Anggota Komisi IX, disepakati nomor 1?

Setuju, ya?

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk melakukan:
 - a. Implementasi skema transisi *School to Work*, integrasi pelatihan dan pemagangan secara terstruktur dan terintegrasi lintas K/L, lembaga

- pendidikan formal, dan industri untuk menekan angka pengangguran muda melalui pelatihan, magang, dan inkubasi kerja;
- b. Evaluasi menyeluruh terhadap lonjakan PHK di sektor padat karya, termasuk identifikasi penyebab, pelatihan ulang, *reskilling*, mitigasi kebijakan, penguatan pengawasan ketenagakerjaan untuk melindungi pekerja, menjaga ketahanan industri nasional, meminimalkan dampak negatif PHK dan mendorong terciptanya pasar kerja yang lebih adaptif dan berkeadilan;
 - c. Penguatan pengawasan dan efektivitas penggunaan dana pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), khususnya untuk pengembangan BLK Kemaritiman dan proyek *Labor Market Information and Skill System Transformation for Labor Market Flexibility* tahun 2025, agar benar-benar mendukung peningkatan kompetensi dan kesiapan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja nasional dan global.

Ibu/Bapak Anggota.

Silakan nomor 2, nomor 2 a, b, c.

Setuju? Disepakati, ya?

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi IX DPR RI menyetujui usulan tambahan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) Tahun 2025 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan rincian:
 - a. Program LISTRAF sebesar Rp117.393.760.000, dan
 - b. Pengembangan BPVP (Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas) Banyuwangi sebesar Rp17.643.921.000.

Bapak/Ibu.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 4, tolong ditambah, Komisi IX DPR RI meminta untuk pertanyaan yang belum terjawab. Nomor 4, ya, seperti biasa, jawaban tertulisnya.

4. Komisi IX DPR RI meminta jawaban tertulis dari pertanyaan Anggota Dewan Komisi IX belum terjawab paling lambat tanggal 8 Mei 2025.

Sepakati?

(RAPAT: SETUJU)

Silakan, Pak Menteri. Dinaikkan dulu nomor 1.

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Prof. YASSIERLI, S.T., M.T., Ph.D):

Baik, terima kasih, Bu Pimpinan.

Iya, nomor satu bagaimana, Prof. Anwar? Ini Prof. Anwar sebagai ini-nya, nih, Bu Nini, nih, sebagai *think tank*-nya, nih.

Bisa, ya?

Dukungan kesiapan perusahaan dalam perencanaan strategis, alokasi sumber daya, koneksi lintas sektor di setiap provinsi.

Perlu untuk menetapkan tim pelaksanaan kita, enggak apa-apa? *Oke*.

Sudah, ya, *oke*, ya? Siap, terima kasih.

Nomor 2.

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Nomor 1 *oke*, ya, Pak, ya?

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Prof. YASSIERLI, S.T., M.T., Ph.D):

Siap.

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

(RAPAT: SETUJU)

Silakan, nomor 2.

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Prof. YASSIERLI, S.T., M.T., Ph.D):

School to Work, Pak Dirjen? A, *oke*, terstruktur dan integrasi lintas K/L lembaga pendidikan formal menekan, *oke*.

Nomor B, Bu Dirjen?

Ini ada *request*, Bu Pimpinan. Menjaga ketahanan industri nasional, artinya kan itu *effort*-nya lintas kementerian, ya?

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Iya.

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Prof. YASSIERLI, S.T., M.T., Ph.D):

Apakah, izin, boleh dihapus, begitu?

Nanti kalau ada satgas PHK sebenarnya sudah mencakup semua nanti sebenarnya, tapi kalau terkait dengan ketenagakerjaan karena menjaga ketahanan industri nasional itu, kan, solusi insentif terkait dengan apa, ekonomi.

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Iya.

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Prof. YASSIERLI, S.T., M.T., Ph.D):

Kemudian terkait dengan itu, sepertinya itu di luar ini kami, Bu.

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Jadi, *request*-nya?

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Prof. YASSIERLI, S.T., M.T., Ph.D):

Di, mohon izin kalau mungkin.

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Dihapus?

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Prof. YASSIERLI, S.T., M.T., Ph.D):

Dihapus saja, begitu, jadi kami lebih fokus ke mitigasi kebijakan, penguatan pengawasan, dan seterusnya.

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Iya.

Oke, menjaga ketahanan industri nasional di-*delete*.

B, bagian b, *oke*.

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Prof. YASSIERLI, S.T., M.T., Ph.D):

Iya, terima kasih, bu Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Silakan, selanjutnya.

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Prof. YASSIERLI, S.T., M.T., Ph.D):

Nomor c, *oke*, ya, siap, ya, Pak Irjen kita ada di sini. Akan mendukung, *oke*.

Ya, nomor c, *oke*, Bu.

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Oke, berarti nomor 2 sudah kita sepakati, ya?

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Prof. YASSIERLI, S.T., M.T., Ph.D):

Iya.

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 3, naikkan nomor 3.

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Prof. YASSIERLI, S.T., M.T., Ph.D):

Tiga.

Angkanya sudah dicek, Pak Sekjen? Aman?

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Lihat titik komanya, ya, Pak. Nanti tambah nolnya, atau kurang nolnya, pusing.

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Prof. YASSIERLI, S.T., M.T., Ph.D):

Oh, bukan tambahan pinjaman, Bu, tambahan pencairan.

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Tambahan pencairan.

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Prof. YASSIERLI, S.T., M.T., Ph.D):

Pencairan.

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Tambahan pencairan.

Iya benar, tambahan pencairan. Pinjamannya di-*delete*.

Karena sebenarnya pinjamannya sudah disepakati, kan, ini tinggal pencairannya saja, kan, Pak?

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Prof. YASSIERLI, S.T., M.T., Ph.D):

Iya.

Pencairan hibah luar negeri, ya boleh juga, tapi kalau ada, ya. P-nya itu memang pinjaman, sih, pencairan pinjaman hibah luar negeri.

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

P-nya pencairan, bukan pinjaman, iya.

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Prof. YASSIERLI, S.T., M.T., Ph.D):

Ya, pencairan pinjaman. Ya. Ya, *oke*.

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Iya.

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Prof. YASSIERLI, S.T., M.T., Ph.D):

Kenapa?

Penulisan, iya enggak apa-apa, ya, sama, ya.

Nol-nol-nya, Bu, izin, nol pakai koma.

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Koma.

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Prof. YASSIERLI, S.T., M.T., Ph.D):

Iya.

Koma minus saja juga enggak apa-apa, iya.

Penarikan, ya, tambahan penarikan, pencairan ini?

Penarikan, ya, bukan pencairan ya? Penarikan pinjaman luar negeri, begitu?

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Apa, penarikan atau pencairan, Pak?

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Prof. YASSIERLI, S.T., M.T., Ph.D):

Bentar, saya lagi tanya dulu.

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Nah.

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Prof. YASSIERLI, S.T., M.T., Ph.D):

Penarikan?

Penarikan, Bu, mohon izin.

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Usulan tambahan penarikan, ya, bahasanya, ya?

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Prof. YASSIERLI, S.T., M.T., Ph.D):

Iya, iya.

Ini mohon izin, ini bahasa, iya.

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Iya, iya, iya, iya.

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Prof. YASSIERLI, S.T., M.T., Ph.D):

Bahasa anggaran.

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Silakan, Pak, dibaca ulang.

Komisi IX DPR RI menyetujui usulan tambahan penarikan pinjaman hibah luar negeri, PHLN Tahun 2025 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan rincian.

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Prof. YASSIERLI, S.T., M.T., Ph.D):

Iya, oke, Bu.

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Oke. Nomor 3 oke, ya?

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Prof. YASSIERLI, S.T., M.T., Ph.D):

Sip.

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Nolnya enggak kurang, kan, Pak Menteri? Pak Sekjen?

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Prof. YASSIERLI, S.T., M.T., Ph.D):

Iya, saya lagi hitung, nih, benar enggak nolnya.

Benar, ya.

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Oke.

Jangan sampai saya *gedok* ternyata nolnya kurang, loh, ini.

(RAPAT: SETUJU)

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Prof. YASSIERLI, S.T., M.T., Ph.D):

Iya.

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Nomor 4 *oke, ya?*

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Prof. YASSIERLI, S.T., M.T., Ph.D):

Oke.

Siap, insya Allah.

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Oke.

(RAPAT: SETUJU)

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Demikian draf kesimpulan sudah disepakati menjadi kesimpulan Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada hari ini, Senin 5 Mei 2025.

Selanjutnya, saya minta untuk Pak Menteri untuk memberikan *closing statement*.

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (Prof. YASSIERLI, S.T., M.T., Ph.D):

Bismillahirrahmanirrahim.

Yang kami hormati, Pimpinan Komisi IX DPR RI, Bapak dan Ibu, Pak Anggota Komisi IX DPR RI, Bapak dan Ibu semua.

Sekali lagi, kami dari Kementerian Ketenagakerjaan mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Rasanya hari ini saya sangat bahagia mendapatkan banyak masukan, kemudian beberapa hal terkait dengan konfirmasi dan juga *concern* dari Bapak dan Ibu terkait dengan perkembangan dinamika ketenagakerjaan yang saat ini kita hadapi.

Kami dari Kementerian Ketenagakerjaan ingin juga terus mendapatkan *support*, ya, memohon agar *support* dan dukungan dari Komisi IX, Pimpinan Komisi IX dan Anggota Komisi IX ini terus dan kolaborasi dan kemitraan yang selama ini kita sudah jalin bisa terus kita tingkatkan di masa yang akan datang.

Terima kasih, Bu Pimpinan Rapat, juga. *Alhamdulillah* rapatnya juga sangat efektif, Bu.

Dan dari kami itu. Kami atas nama Kementerian Ketenagakerjaan ucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang.

*Billahi taufiq wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Wamen ke mana?

Bukan karena merokok kan, tadi disampaikan oleh.

Terima kasih, Pak Menteri.

Bapak/Ibu yang saya hormati.

Demikian rapat kerja kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri mari kita bersama berdoa semoga rapat kita pada hari ini bermanfaat untuk rakyat Indonesia.

Berdoa dipersilakan.

(RAPAT: BERDOA)

Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Demikian rapat saya akhiri.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamitthariq,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.25 WIB)

**a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT**

Ttd

**Ida Nuryati, S.Sos., M.A.
NIP.197604011998032002**